



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN KREDIT MIKRO NAGARI DI KELURAHAN TABING BANDA GADANG KECAMATAN NANGGOLO KOTA PADANG

SKRIPSI



**UUT HIDAYAT
04914022**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN
KREDIT MIKRO NAGARI DI KELURAHAN TABING BANDA
GADANG KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG**



OLEH

UUT HIDAYAT

04 914 022

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN
KREDIT MIKRO NAGARI DI KELURAHAN TABING BANDA
GADANG KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG**

OLEH

UUT HIDAYAT

04 914 022

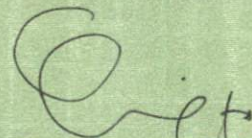
MENYETUJUI:

Dosen Pembimbing I



Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc
NIP. 19591031 198603 1 005

Dosen Pembimbing II



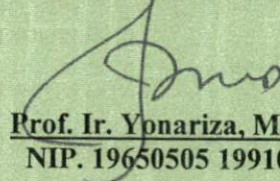
Cipta Budiman, SSi, MM
NIP. 132315389



**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**

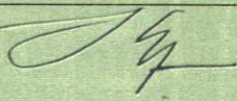

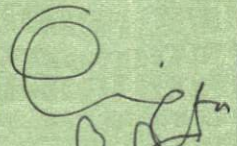


Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP. 19531216 198003 1 004

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



Prof. Ir. Ypnariza, M.Sc, Ph.D
NIP. 19650505 199103 1 003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 14 November 2011

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS		Ketua
2.	Dr. Ir. Endry Martius, MSc		Sekretaris
3.	Cipta Budiman, SSi, MM		Anggota
4.	Ferdinal Asful, Sp, MSi		Anggota
5.	Dr. Ir. Osmet, MSc		Anggota



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak Ada sedikitpun kejadian diluar kehendakmu...

Semua kuasa atas rencana-Mu dan rahmat-Mu.

Ku berserah hanya padaMu Ya Rob...

Syukurku atas segala nikmat dan anugerahmu...

..., Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al Mujaadilah (58) : 11)

Kupersembahkan karyaku dan ucapan terima kasihku teruntuk Ayah dan Ibu, atas segala pengorbanan dan kasih sayangmu dengan sabar dan tabah engkau antarakan aku untuk mewujudkan mimpiiku...senyummu adalah asa bagiku.dengan tertatih ku selesaikan karyaku ini.

Teruntuk Bapak Dr. Ir. Endry Martius Msc selaku pembimbing I dan bapak Cipta Budiman SSi. MM. selaku pembimbing II terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Teruntuk : Keluarga besarku yang tak bias kusebutkan satu persatu.Terima kasih untuk bantuan dan dukungannya selama ini Tek Uncu (terima kasih telah mengurus dan menjagaaku) buat adek-adekku semuanya terima kasih selalu jadi penenang dalam gundahku.buat agung (kita adalah kebanggaan orang tua kita, maka buatlah mereka bangga). Buat sepupuku titi, selamat sudah jadi S.Pd.

Teruntuk orang-orang yang selalu disampingku *special thanks* untuk Dini Syafitri, S.P. (terima kasih telah menjadi separoh roh ku dalam menghadapi semua ini). Untuk icha dan niken (telah menjadi obat stress yang ampuh). Buat teman-teman seperjuangan Marabaiq, S.P, Olen S.P, Nia S.P, Atusak S.P, Ridhwan S.P, (the last Of, lakon pasti datangnya terakhir. Buat papa dan mama icha(terima kasih telah bersedia rumah beliau menjadi markas perbanyakan skripsi.

Buat teman- teman angkatan 07: Rendra, Gito, Monang, Ado, Andre, dll.

Dan angkatan 06 : buat Peni S.P,Ibet S.P, Melda S.P, Ami, Putri dll.

Buat angkatan 05 : Ajo, Harris, Eko, Nof, Oki, dll.

Buat teman sepembimbingan pak endry martius : rado, fahrizren, meli, rika, icha haswar, kuil, bimbin, ridho syukrian,dicki, yona dll.(terima kasih atas kebersamaannya semasa sepembimbingan.

Buat teman-teman di UKM PANDEKAR UNAND yang selalu menjadi inspirasiku (Wirman, Inyiek, Uul, padli, karek, dajal,titin,bang put, suheng yosi, arina, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.(terima kasih untuk semangatnya).

Ya Allah, benahilah pengetahuan dan pengalaman agama dan ilmuku, yang akan menjadi penjaga urusanku. Benahilah duniaku, tempat mencari penghidupan & Baguskanlah kehidupan akhiratku, tempat aku kembali... Amin ya Rabb...

BIODATA

Penulis dilahirkan di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 16 April 1985 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Sukirman dan Asmuniarti. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD N 03 Anduring, Padang (1992-1998). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di MTs Negeri Gunung Pangilun Padang (1998-2001). Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SMA PGRI 1 Padang, lulus pada tahun 2004. Dan pada tahun 2004 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Jurusan Sosial Ekonomi Program Studi Agribisnis.

Padang, November 2011

Uut Hidayat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Faktor – Faktor penyebab Kemacetan Kerdit Mikro Nagari Di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang** ”.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir Endry Martius, M.Sc, selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Cipta Budiman, SSi, MM selaku dosen pembimbing dua yang telah memberi petunjuk, saran dan pengarahan dari penyusunan proposal, dalam penelitian sampai penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan, Ketua serta Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, seluruh dosen, karyawan Fakultas Pertanian yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bantuan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang dan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan dalam pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Padang, November 2011

U.H

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 .Tinjauan Umum tentang Kredit	5
2.2 Penyebab Kemiskinan.....	6
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit	7
2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	11
2.5 Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	14
2.6 Program Kredit Mikro Nagari.....	15
2.7 Efektivitas Program.....	17
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	21
3.3 Variabel Diamati	22
3.4 Metode Pengumpulan Data	23
3.5 Analisis Data	24

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	26
4.2 Identitas Responden	28
4.3 Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kelurahan Melalui Program KMN Di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kota Padang.....	30
4.4 Menganalisis Faktor – Faktor Penyebab Kemacetan Kredit Mikro Nagari Dikelurahan Tabing Banda Gadang.....	46

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....	54
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Bagan Organisasi Pokja kelurahan	33
2. Mekanisme Penyaluran Dana	40
3. Prosedur Pengembalian Dana KMN	43
4. Peninjauan Yang Dilakukan Oleh Fungsi Pengawasan	50

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Penentuan jumlah sampel penerima KMN	22
2. Penentuan jumlah sampel key informan.....	22
3. Luas wilayah kelurahan tabing banda gadang	26
4. Potensi sumber daya alam	27
5. Sebaran Penduduk berdasarkan kelompok umur	27
6. Data masyarakat miskin di Kec. Nanggalo.....	28
7. Identitas responden penerima dana KMN	28
8. Identitas responden key informan.....	29
9. Persiapan Program KMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang dengan Juknis.....	31
10. Pokja Pelaksana Kredit Mikro Nagari, Kelurahan Tabing Banda Gadang.....	32
11. Perencanaan program KMN di tabing banda gadang dengan juknis	34
12. Anggota peminjam dana KMN	36
13. Pengalaman Usaha Responden Peminjam Dana KMN	37
14. Pelaksanaan Program KMN di Tabing Banda Gadang dengan Juknis	38
15. Keadaan responden	47
16. Sebaran pendapatan responden	48

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Daftar Penerima Dana KMN.....	56
2. Data Keadaan Penerima KMN di Kec. Nanggalo	57
3. Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana PUAP Tahun 2009	58
4. Daftar hadir rapat pembentukan pokja Kelurahan	59
5. Surat permohonan izin penyaluran bantuan	60
6. Berita Acara Musyawarah Kelurahan Tabing Banda Gadang	61
7. Surat perjanjian pemberian bantuan KMN.....	62
8. Surat keputusan Lurah Tabing Banda Gadang.....	63
9. Laporan pelaksanaan KMN.....	64
10. Matrik data set.....	65
11. Quisioner	66
12. Rekapitulasi jawaban responden	67

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN KREDIT MIKRO NAGARI DI KELURAHAN TABING BANDA GADANG KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

ABSTRAK

Penelitian ini adalah menganalisis faktor – faktor penyebab kemacetan kredit mikro nagari (KMN) di Kelurahan Tabin Bandad Gadang. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2011 sampai dengan Oktober 2011. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan Program KMN di Kelurahan Tabin Bandad Gadang dan menganalisis faktor – faktor penyebab kemacetan kredit mikro nagari (KMN) di kelurahan Tabin Bandad Gadang. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Responden ditetapkan sebanyak 30 orang dari 159 orang masyarakat penerima KMN, diambil secara *simple random sampling*. Data hasil penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan Program KMN masih belum sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, diantaranya: a. Tidak adanya identifikasi penerima program, b. Tidak ada penilaian kelayakan usaha penerima program, c. Tidak adanya aturan – aturan yang mengikat tentang syarat menjadi anggota dan tidak adanya kepastian kelompok awal dan kelompok tunggu, d. Tidak ada sanksi untuk untuk keterlambatan pengembalian, e. Tidak adanya keterbukaan pengurus mengenai pelaksanaan program dan tidak berjalannya fungsi pengawasan. Sehingga membuat banyak anggota yang tidak mau membayar angsuran dan membuat kredit macet di kelurahan tabing banda gadang. Untuk keberhasilan berjalannya program pemerintah dan suksesnya pengentasan kemiskinan di kelurahan tabing banda gadang sebaiknya program-program penanggulangan kemiskinan seperti kredit mikro nagari (KMN) dilakukan dan dijalankan dalam kelompok – kelompok kecil mudah dalam pengawasan. Apabila proses pengawasan berjalan lancar maka kemungkinan kredit itu macet yang diakibatkan karena peminjam tidak mau bayar sangat kecil, karena selalu ada evaluasi program. Dan program penangulangan kemiskinan seperti KMN dapat berjalan lancar.

**FACTORS FOR NON PERFORMANCE LOAN OF KREDIT
MIKRO NAGARI IN KELURAHAN TABING BANDA
GADANG, KECAMATAN NANGGALO, PADANG
MUNICIPALITY**

ABSTRACT

This study aims to describe Kredit Mikro Nagari (KMN) program implementation in Kelurahan Tabin Banda Gadang and to identify the factors for non performance loan of KMN. Data were gathered by interviewing 30 micro-credit borrowers, whom sampled randomly. The data, then, are analyzed qualitatively.

The program has not been well implemented. Some activities were not carried out in line with guideline. There was no credit-borrowers identification, absence borrowers' micro-business feasibility analysis, absence rule in membership and snaction, in-transparency credit management due to lack of controlling. Therefore, credit repayment rate is very low.

It is extremely needed intensive controlling in credit disbursement in order to reduce non performance loan. It is possible when the credit distributed to small group of borrowers.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dari misteri kemiskinan ini di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus (Suharto, 2005).

Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, hidup sehat, pendidikan, komunikasi, sosial dan sebagainya. Penduduk miskin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya, karena tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan (Mubyarto, 1994). Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan biasa terjadi yakni kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian masyarakat tidak mampu menguasai ekonomi hingga mereka tetap miskin. Maka itu sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan (Mubyarto, 1999). Akibat dari krisis multidimensi tahun 1997 – 2000 dan kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2005. Tingkat keparahan kemiskinan juga semakin meningkat sehingga memerlukan upaya penanggulangan serius yang membutuhkan: komitmen, konsistensi dan keberlanjutan program. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 12,07% relatif meningkat bila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2005 sebesar 10,04%. Mengacu pada 14 indikator sosial ekonomi rumah tangga miskin pada tahun 2007 BPS mencatat angka kemiskinan telah mencapai 1,6 juta orang dari 4.450.000 penduduk. Kegagalan dalam program pengentasan kemiskinan selama ini bisa jadi disebabkan karena informasi mengenai penduduk miskin yang diolah berdasarkan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 2007) yang hanya bersifat makro. Kondisi ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan

program pengentasan kemiskinan sehingga tidak berdampak secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin (Syafii, 2007).

Bantuan yang diberikan hendaknya bukan berupa proyek bagi-bagi uang, namun bantuan tersebut diharapkan mampu menyentuh akar permasalahan masyarakat miskin itu sendiri hingga mereka bisa keluar dari kondisi kemiskinan. Husein (1996) *cit* Kasim (2007) menyatakan agar penanggulangan kemiskinan efektif maka prinsip penyelenggaraannya haruslah “*as local as possible*” yaitu semaksimal mungkin mengikutsertakan *institusi lokal*, sehingga penanganannya diharapkan akan lebih memiliki komitmen yang tinggi, konsisten penanganannya dan berkelanjutan program bantuannya.

Di Sumatera Barat pendekatan “*institusi lokal*” tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari karena sesuai budaya Minangkabau dan telah diatur dalam Peraturan Daerah No 02 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang menyatakan bahwa nagari adalah unit pemerintahan terdepan serta berperan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat. Pengertian “*lokal*” tidak hanya diartikan sebagai kedekatan lokasi tetapi yang terpenting adalah kedekatan emosional. Oleh karena itu, pemerintah nagari dinilai mampu memahami pendekatan kelompok di daerahnya melalui “ikatan emosional yang dekat” dalam memberdayakan masyarakatnya yang miskin. Kelompok keluarga miskin yang dibentuk bisa saja mempunyai basis: suku, mesjid/surau (kelompok kegiatan keagamaan), lapangan usaha, ataupun keluarga. Tujuannya agar perilaku (suara hati) dari rumah tangga miskin tersebut lebih bisa didengar sehingga mempermudah upaya pemberdayaannya (BPM, 2007).

Untuk maksud itu, pemerintah provinsi Sumatra Barat meluncurkan program Kredit Mikro Nagari (KMN) pada tahun 2007 yakni program penyediaan modal murah bagi pengusaha kecil dan mikro sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan yang berbasis nagari. Setiap nagari disediakan dana tiga ratus juta rupiah yang merupakan modal awal nagari dalam mengembangkan program kredit mikro nagari ini, dimana dana ini nantinya akan disalurkan kemasyarakat melalui kelompok – kelompok masyarakat sebagai dana penguat modal usaha anggota kelompok. (Juknis KMN, 2007)

1.2. Rumusan Masalah

Di Kota Padang terdapat 24 kelurahan penerima dana Kredit Mikro Nagari salah satunya adalah kelurahan Tabing Banda Gadang (lampiran 1). Dari data kelurahan Tabing Banda Gadang adalah kelurahan dengan jumlah penerima dana Kredit Mikro Nagari paling tinggi presentase menunggaknya apabila dibandingkan dengan 5 kelurahan lainnya di Kecamatan Nanggalo yaitu dari 159 anggota penerima 140 orang penerima adalah macet, dengan kata lain 88% dari anggota penerima dana Kredit Mikro Nagari adalah macet

Bahkan sampai febuari 20011 keadaan tersebut tidak berubah. Sehingga timbul pertanyaan mengapa masyakat anggota penerima dana Kredit Mikro Nagari ini tidak mau membayar atau melunasi pinjamannya, padahal menurut sekretaris kelurahan tabing banda gadang sebelum program Kredit Mikro Nagari ini juga ada program penanggulangan memiskinan lainnya yaitu PNPM, tapi program tersebut tidak telalu banyak yang macet dan boleh dibilang lancar dan berkembang. Oleh karena itu dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kota Padang?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kemacetan KMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kota Padang

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul”**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN KREDIT MIKRO NAGARI DI KELURAHAN TABING BANDA GADANG KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG**”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan proses pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
2. Menganalisa faktor- faktor penyebab kemacetan pengembalian kredit.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa KMN ini dapat berkembang dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang signifikan kepada upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berkaitan dengan Pengkreditan Mikro Nagari dan dapat menjadi acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fenomena dan Proses Kemiskinan

Bicara masalah kemiskinan bukan merupakan isu baru, melainkan isu yang seolah abadi sepanjang zaman. Betapa menggelisahkan di era yang semakin canggih, kemiskinan masih saja tetap dominan bahkan kemajuan zaman yang diekspresikan melalui ilmu pengetahuan teknologi, budaya dan modernitas, disatu sisi hanyalah memberikan kontribusi kesejahteraan pada sebagian kecil penduduk dunia. Sedangkan kejayaan sebagian kecil manusia di belahan bumi ini sering kali menelan dan mengorbankan sebagian besar manusia lainnya ke lembah kemiskinan.

Berbeda dengan pandangan yang melihat kemiskinan sebagai suatu fenomena, akan tetapi lebih merupakan proses yang disebabkan akibat kerentanan pada banyak faktor. Cara pandang ini melihat kemiskinan dengan lebih tajam dan menitik pada akar permasalahan yang dihadapi. Kemiskinan dilihat sebagai proses yang disebabkan dari berbagai faktor, dalam hal ini kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang dipengaruhi secara sistemik yang didalamnya dipengaruhi oleh banyak aspek. Kemiskinan dibentuk dari kondisi suatu negara dari waktu ke waktu, secara tersirat kemiskinan dapat dianalisis menggunakan dimensi waktu dan sistem, dengan demikian kemiskinan tidak terlepas dari bagaimana program dicanangkan, kebijakan alokasi sumber daya dan termasuk bagaimana kondisi tereduksi melalui perjalanan sejarah bangsa, kebijakan pembangunan, kemampuan sumber daya baik natural resources, teknologi sumber daya manusia, selain itu manajemen dan distribusi sumber daya tersebut (Teguh, 2006).

Sayogyo (1985) *cit* Edwina (2000) membedakan kemiskinan penduduk antara pedesaan dengan perkotaan yang dilihat dari pengeluaran setara dengan beras perkapita per tahun. Untuk daerah pedesaan penduduk dikategorikan paling miskin, miskin sekali dan sangat miskin dengan tingkat pengeluaran 180 Kg, 240 Kg, 320 Kg sedangkan untuk daerah perkotaan 270 Kg, 360 Kg, dan 480 Kg.

Menurut Esmara (1986) pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup layak dan bila tingkat pendapatan

tidak dapat mencapai tingkat minimum maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin, sehingga diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum yang memungkinkan mereka memperoleh kebutuhan dasarnya. Dengan demikian kemiskinan dapat diukur dengan memperoleh tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar antara keadaan miskin dan tidak miskin atau bisa disebut garis kemiskinan. Konsep ini dikenal dengan kemiskinan mutlak atau kemiskinan absolute.

Kemiskinan dapat diukur dengan jumlah kalori yang dikonsumsi setiap orang setiap hari. Badan Pusat statistik (BPS) menggunakan kalori sebagai tolak ukur kemiskinan sebesar 2.100/kapita/hari. Kelemahan kalori sebagai tolak ukur kemiskinan adalah jumlah kalori yang sama dapat dihasilkan dari makanan yang berharga mahal dan dapat pula dihasilkan dari makanan yang berharga murah, padahal kebutuhan hidup bukan hanya kalori tetapi juga termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain (BPS, 2006).

2.2. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat digolongkan sebagai berikut : Kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di dalam masyarakat itu. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi, kolusi serta perekonomian internasional yang lebih menguntungkan kelompok Negara tertentu (Baswir, 1999 *cit* khairul, 2006)

Menurut Soeharto (2005) dalam melihat kemiskinan khusus dari perspektif individual dan kultural, kemiskinan disebabkan oleh kesalahan-kesalahan individu yang bersangkutan. Seorang miskin karena malas tidak mau bekerja atau tidak memiliki etos wirausaha. Sebaliknya perspektif internasional struktural memandang bahwa seseorang miskin disebabkan oleh sistem sosial yang tidak kuat, tidak adil dan bahkan menindas.

Menurut Asnawi (1999) kunci utama penyebab kemiskinan karena masih rendahnya tingkat pendidikan disamping masih buta huruf yang berpendidikan pun hanya paling tinggi tamat SD. Akibat dari pendidikan yang rendah inilah yang menyebabkan kurang gizi, kurang sehat, masih bersikap tradisional, kurang terampil, wawasan juga kurang luas, suka pasrah pada nasib dan usahanya masih bersifat subsistem.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang artinya adalah kepercayaan (*truth atau faith*), maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali (Kasmir, 2002).

Menurut Tucker kredit adalah pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan dapat/mampu membayar dengan nilai/harga yang sama diwaktu yang akan datang. Sedangkan menurut Amir R. Batubara, kredit adalah suatu pemberian prestasi yang kontrak prestasinya akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang (Hadiwidjaja dan Wirasasmita, 2000).

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2003). Sementara menurut Hasibuan (2005) berpendapat bahwa kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pemberian kredit itu sendiri bertujuan untuk turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat dan memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya (Suyatno dkk, 2003).

Menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita (2000) fungsi kredit dijalankan untuk berbagai kegunaan:

1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa, seandainya suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar dengan adanya kredit lalu lintas barang dan jasa dapat berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran, Bila kelebihan dana pada orang yang mempunyai pendapatan lebih besar dari kebutuhannya dipindahkan pada golongan yang berpendapatan lebih kecil dari kebutuhannya maka itu menjadi efektif.
3. Kredit dapat dijadikan sebagai alat pengendali harga. Fisher Equation menyatakan uang yang beredar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga. Untuk jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan mempermudah pemberian kredit pada masyarakat, dan sebaliknya untuk mengurangi peredaran uang dimasyarakat maka dilakukan pembatasan kredit.
4. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Salah satu macam kredit yang biasa diberikan oleh Bank Umum adalah kredit rekening koran. Begitu perjanjian kredit ditanda tangani dan persyaratan penarikan kreditnya dipenuhi, maka telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit tersebut.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

Menurut Kasmir (2002) unsur-unsur yang terdapat didalam kredit adalah:

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang dan jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Kesepakatan, dimana kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko, faktor kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu

dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja akibat terjadinya musibah.

5. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang disebut dengan bunga. Disamping itu balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan pendapatan bank.

Selanjutnya dalam menganalisis permohonan kredit diperlukan suatu standar analisis yang meliputi penilaian atas seluruh aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian tingkat kelayakannya, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa usaha calon debitur layak atau tidak layak dibiayai.

Ditinjau dari penggunaannya, kredit dibedakan atas kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk memperlancar pembiayaan suatu usaha produktif. Sedangkan kredit konsumtif adalah kredit yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup (Hadiwidjaja dan Wirasasmita, 2000).

Batubara *cit* Anggaraini (2005) mengatakan bahwa kredit yang disalurkan ke daerah pedesaan pada umumnya dimaksudkan untuk tujuan produktif. Namun karena kebutuhann konsumtif belum terpenuhi maka pengalihan tujuan kredit tidak dapat dihindarkan.

Dalam masyarakat pedesaan disatu pihak kita melihat keperluan kredit yang hampir tidak pernah terpenuhi, sedangkan dipihak lain badan-badan kredit formal dalam kenyataannya menyediakan sebagian kecil saja dari keperluan akan kredit tersebut. Sudah banyak dilaporkan bahwa salah satu sebabnya pemberian kredit kepada petani di negara-negara yang sedang berkembang adalah karena kredit pertanian lebih sedikit bagi keperluan produksi dan lebih banyak untuk keperluan konsumsi. Dalam hal demikian maka tidak mengherankan bahwa yang paling mudah bagi lembaga perkreditan adalah menolak pemberian kredit tersebut (Mubyarto, 1994).

Prinsip pemberian kredit yang dianalisa dengan 5C kredit adalah:

- (1) *character* yaitu sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.

(2) *Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

(3) *Capital* yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

(4) *Colleteral* merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

(5) *Condition* yaitu kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing (Kasmir, 2002).

Untung (2000) menyatakan bahwa, kredit berdasarkan kolektibilitasnya dalam surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dibedakan menjadi:

1. Kredit lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan dibawah ini :

- Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau cerukan atau penarikan.
- Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan), atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau 3 bulanan, atau belum melampaui 6 bulan bila angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih.
- Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

2. Kredit kurang lancar

- Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan (tetapi belum melampaui 2 bulan) bagi kredit yang masa angsurannya 1 bulan atau melampaui 3 bulan (tetapi belum melampaui 6 bulan) bagi kredit yang ditetapkan 2 bulanan atau 3 bulanan atau melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.
- Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

- Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi yang angsuran kreditnya 1 bulan.
 - Atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi angsurannya yang melebihi 1 bulan.
3. Kredit yang diragukan, yaitu yang tidak mematuhi kriteria lancar atau kurang lancar seperti tersebut pada poin 1 dan 2, tetapi kredit tersebut (akan) dapat diselamatkan dan agunannya bernilai kurang dari 75% dari utang debitur, atau tidak bisa diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.
4. Kredit macet yaitu:
- Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti poin 1, 2 dan 3.
 - Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada perlunasan atau belum ada usaha perlunasan kredit.
 - Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BPUN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit.

Adapun langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank adalah tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit. Adakalanya beberapa kredit memiliki kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya (Suyatno, 2003).

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit

Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melunasi kewajibannya dalam mengembalikan kredit menurut Sukmadi dan Sudrajat (1994) dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu pendapatan dimana bila pendapatan mereka bertambah maka peminjam akan cenderung melunasi kewajibannya. Selain pendapatan, kemampuan peminjam maupun kelompok dalam mengelola kelompok akan sangat mempengaruhi peminjam. Semakin baik

pengelolaan suatu kelompok, semakin besarlah kesadaran anggotanya dalam melunasi kewajibannya.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peminjam untuk mengembalikan kredit yaitu adanya bencana alam yang mengakibatkan terjadinya kegagalan panen. Hal ini akan mengakibatkan petani tidak menerima hasil usahatannya sehingga petani tidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu kebijakan pemerintah juga menjadi penentu mau tidaknya petani membayar kredit. Sikap pemerintah yang seringkali melakukan pemutihan terhadap kredit pertanian menimbulkan persepsi dikalangan petani bahwa kredit dari pemerintah tidak perlu dibayar (Sukamdi dan Sudrajad, 1994).

Syukur, dkk (1999) juga mengatakan bahwa semakin meningkat faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pengembalian pinjaman (kredit) dipengaruhi oleh karakteristik petani yang digolongkan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu petani dan faktor eksternal berupa situasi ekonomi, situasi penunjang non-ekonomi, dan kondisi finansial petani. Faktor yang berperan positif bagi petani dalam membayar kredit diantaranya: pengetahuan terhadap kredit dan pengalaman berusaha, penagihan yang dilakukan oleh petugas, dan nisbah antara pendapatan dengan jumlah pinjaman kredit yang diterima. Sementara itu, yang berperan negatif atau yang menimbulkan kecenderungan peminjam tidak membayar kembali pinjamannya adalah: tingginya pengeluaran konsumsi keluarga, dan nisbah jumlah kredit dan penerimaan yang diterima oleh peminjam.

Sementara itu, Sanin *cit* Syukur, dkk (1999) menyatakan bahwa faktor pendorong pengembalian kredit adalah pengalaman menerima kredit, keterlibatan dalam penyusunan Rencana Definit Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah tabungan kelompok tani, dan frekuensi pembinaan oleh PPL.

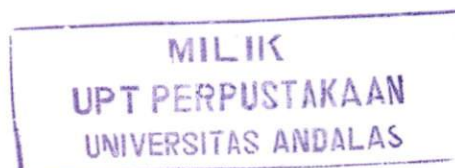
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mayrowani, dkk (1998) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi peminjam dalam mengembalikan kredit adalah *monitoring* yang dilakukan petugas, kemudian peminjam dalam mengakses kredit, ketepatan waktu penyaluran, bentuk dan cara penagihan, pemahaman peminjam tentang kredit, kemampuan peminjam dalam mengelola kredit, dan kemampuan manajerial kelompok.

Dalam hal kredit ini, si penerima kredit menerima benda atau uang tunai pada waktu diperlukan, sementara imbalannya ditangguhkan pada waktu yang lain dikemudian hari yang sesuai dengan kesanggupan si penerima dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penangguhan ini didasarkan pada kepercayaan pada pihak pemberi terhadap pihak penerima, kepercayaan ini didasarkan pada (1) nama baik si penerima, (2) harta si penerima, (3) keadaan perusahaan, (4) kepandaian sebagai pengusaha, (5) kejujuran (Adiwilaga, 1974).

Uang tunai harus tersedia untuk pengeluaran hidup keluarga, dan untuk membeli sarana produksi bagi pelaksana perencanaan usaha. Apabila pembayaran-pembayaran ini tidak dapat dipenuhi dari pendapatan pada tahun sebelumnya, maka diperlukan kredit itu tersedia pada pelepas uang atau bank, dan peminjam mampu membayar bunga kredit serta jumlah pinjaman pokok dari arus pendapatan yang diproyeksikan (Sukartawi, Suharja, Dillon, Bryan, 1986).

Sejak tahun 1969 memang sudah dimulai dengan pemberian kredit kepada petani atas jaminan tanaman, tapi perkembangan kredit tidak memuaskan. Petani belum biasa dan tidak memandang kewajiban-kewajiban terhadap pemberi kredit secara serius akibatnya terlalu banyak tunggakan. Salah satu penyebab utama dari perkembangan demikian harus dicari bidang lain, dalam hal ini peminjam mempunyai pandangan yang statis, sedang pinjaman produksi merupakan suatu hal yang dinamis. Hanya apabila peminjam punya pandangan hidup yang dinamis pula, barulah ia akan menangkap makna dan nilai sebenarnya daripada perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dengan bank, karena meminjamkan kepada petani dan orang-orang kecil mempunyai banyak resiko, biasanya bunga yang diminta selalu tinggi (Adiwilaga, 1974).

Menurut Mubyarto (1977) bahwa Sudjana telah melakukan penelitian yang mendalam mengenai kredit kepada petani padi dan memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemberian kredit usaha tani dengan biaya yang ringan perlu untuk memungkinkan petani melakukan inovasi-inovasi dalam usahanya, (2) Kredit itu harus bersifat kredit dinamis, yaitu mendorong seseorang untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti, (3) Kredit yang diberikan selain merupakan bantuan modal juga merupakan perangsang untuk menerima petunjuk-petunjuk untuk bersedia berpartisipasi



dalam program peningkatan produksi, (4) Kredit pertanian yang diberikan kepada petani tidak perlu hanya terbatas pada kredit usaha tani yang langsung diberikan bagi produksi pertanian, tetapi pula harus mencakup kredit-kredit untuk keperluan rumah tangga (konsumsi).

Menurut Mosher (1987) bahwa masalah peminjam sehubungan dengan kredit produksi diantaranya adalah: (1) menaksir besarnya hasil yang akan diperolehnya, (2) menaksir berapa harga pasar, (3) biaya kredit, (4) sanksi kalau tidak melunasi pinjaman.

2.5. Usaha Kecil Menengah dan Mikro

Pengertian tentang usaha kecil menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Mengacu Undang-Undang No.9 tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah: (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), (2) memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Miliar/tahun. Untuk kriteria usaha menengah: (1) untuk sektor industri, memiliki total aset paling banyak Rp. 5 miliar dan (2) untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 Miliar (Partomo dan Rachman S. 2002).

Sejak awal dasawarsa tujuh puluhan secara tajam mulai disadari, bahwa meskipun mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun kebanyakan negara berkembang belumlah berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja umumnya, baik ditinjau dari segi tingkat pendapatan, ataupun kesesuaian pekerjaan dengan keahlian. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas ternyata masih berada pada rentang perjalanan yang panjang. Bertolak dari kenyataan inilah maka eksistensi industri kecil, telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan dinegara-negara berkembang (Saleh, 1992).

Karena itu merupakan suatu keharusan dalam membina dan mengembangkan usaha kecil, agar mereka tumbuh sebagai komponen dunia usaha yang kuat, tangguh efisien dan mandiri serta mampu memberikan sumbangan

yang besar bagi perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemerataan dan pendapatan masyarakat (jurnal Ilmu-ilmu sosial, 2004).

Pada masa sekarang UKM masih memiliki banyak kelemahan dan perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antar instansi. Tujuan pembinaan UKM tersebut adalah:

Perkembangan perkreditan nasional merupakan cermin dari dinamika investasi di sektor riil, sekaligus pemacu proses pematangan sistim ekonomi secara keseluruhan. Sumber-sumber dana yang tersalurkan ke dalam investasi-investasi diberbagai sektor ekonomi menjadi pertanda bahwa sistim perekonomian berjalan atas dasar dukungan sektor moneter. Alokasi dana perbankan baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya sangat mempengaruhi situasi investasi sehingga segala kebijakan perkreditan yang ada akan berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian secara umum (Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 2004).

Bank Indonesia memperkenalkan berbagai bentuk perkreditan untuk masyarakat lapisan bawah, dengan maksud agar mereka memperoleh akses yang memadai terhadap sumber dana yang ada. Sejumlah besar tenaga kerja terlibat didalam ragam usaha kecil baik di bidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa lainnya. Kebijakan yang digariskan Bank Indonesia untuk mengembangkan usaha kecil tidak saja untuk memberi kredit yang diperlukan, tetapi juga membantu masalah-masalah lain yang sangat terkait, seperti: alternatif jaminan kredit, pengembangan kelompok, bantuan pemasaran, latihan, bimbingan teknis dan pengembangan sumber daya manusia secara umum.

2.6. Program Kredit Mikro Nagari

Bantuan Kredit Mikro Nagari (BKM) merupakan program penanggulangan kemiskinan di tingkat nagari dengan memberikan stimulan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat nagari agar mampu berkembang secara berkelanjutan (TKPK, 2007)

Strategi yang digunakan dalam penyaluran bantuan kredit mikro nagari adalah:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat miskin baik penduduk laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh jaminan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat serta terwujudnya keterbukaan, akuntabilitas/pertanggungjawaban.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola potensi dan sumber daya sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mendorong perekonomian yang berkelanjutan.
3. Peningkatan kapasitas nagari, peningkatan kemampuan nagari sebagai unit pemerintahan terdepan dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan pembangunan wilayah nagari. Selain itu meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat (BPD, LPM dan lembaga lainnya) dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program pembangunan nagari.
4. Perluasan Kesempatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan aksesibilitas permodalan yang murah dan mudah dengan jaminan sosial dari masyarakat dan institusi nagari.
5. Peningkatan sinergisitas program pembangunan oleh pemerintah dalam konteks pemerintahan nagari.

Pendekatan operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan KMN adalah:

1. Pelaksanaan program kredit mikro dilakukan dengan bertumpu pada keompok masyarakat (Community Based Development).
2. Penentuan kelompok, prioritas kegiatan serta jenis usaha yang diselenggarakan melalui mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Nagari sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya lokal.
3. Pemberian kredit permodalan diprioritaskan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat miskin yang telah dan sedang berusaha dalam skala kecil dan mikro.
4. KMN dilaksanakan melalui sistim bergulir dan bergilir dalam rangka memperluas capaian kelompok sasaran keluarga miskin.

5. Optimalisasi peranan kelompok kerja, tenaga pendamping, pejabat pemerintah dan LSM dalam pengelolaan kredit mikro nagari.
6. Pemanfaatan dan pemberdayaan lembaga keuangan lokal (BPR, LPN, Baitul Mal) sebagai penatausahaan keuangan Program KMN.
7. Peningkatan peran dan fungsi ninik mamak, bundo kandung, alim ulama, tokoh masyarakat dan perantau dalam pengembangan jaminan sosial.

KMN diberikan kepada kelompok keluarga miskin nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Bidang usaha yang di bantu atau difasilitasi, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya (sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia) yang ada di nagari. Komponen kegiatan yang dibantu dan difasilitasi dengan program kredit mikro nagari, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada nagari.
2. Kegiatan pendukung pelaksanaan Kredit Mikro Nagari, yang meliputi:
 - Biaya administrasi dan supervise bank
 - Biaya pendamping/fasilitas/pembinaan (SPMN)
3. Kegiatan operasional nagari untuk menunjang pengelolaan kredit mikro dan kegiatan pemerintahan di tingkat nagari.
4. Kredit mikro nagari tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial lainnya.

2.7. Efektifitas Program

Menurut Israel, A (1992) konsep efektifitas bersifat relatif menurut lokasi atau kegiatan, teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu menurut Agustas. A (1999) usaha untuk menilai efektifitas dan membuat perbandingan antar wilayah sektoral teknologi sering menimbulkan masalah metodologi yang serius. Lebih lanjut ia katakan bagaimana misalnya membandingkan antar program yang sama pada lokasi yang berbeda, jenis program yang berbeda pada lokasi yang sama atau jenis program yang berbeda pada lokasi yang berbeda.

Konsep efektifitas lebih luas dan harus meliputi kapasitas suatu program dapat mencapai tujuan operasional secara tepat. Dalam konteks ini efektifitas

program adalah seberapa jauh program berjalan dibandingkan dengan seperangkat standarnya sendiri. Tapi menurut Israel, A (1992) efektifitas juga dapat diukur menurut standar yang sifatnya eksternal dari suatu program. Tidak ada konsensus dalam literatur tentang standar eksternal mana yang harus dipakai. Keberhasilan, kegagalan, dan dampak dari suatu program tidak hanya ditentukan oleh program itu sendiri, tetapi dalam banyak hal ditentukan juga oleh program-program lain yang berkaitan dengannya (Agustas. A, 1999).

Nafziger (1990) dalam bukunya *the economics of developing countries an individual project should be evaluated in relation to other projects, and not in isolation*. Konsep Nafziger ini pada pokoknya menekankan bahwa suatu program maupun proyek pembangunan dapat berhasil baik bila mampu melakukan sinergi dengan program atau proyek-proyek lain.

Sistim interaksi/sinergitas antar program terutama dapat memberikan gambaran keterkaitan dan saling ketergantungan (independensi) antar program baik secara ekologi, ekonomi dan sosio-kultural. Identifikasi dan pengembangan potensi antar program dapat dijadikan dasar acuan bagi daerah terkait dalam suatu wilayah dalam mengembangkan dan mengelola secara bersama-sama sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang dimiliki wilayah tersebut melalui sinergi program daerah dan wilayah tersebut.

2.8. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu membahas program-program pemberdayaan menanggulangi masalah kemiskinan antara lain: Menurut Tim Peneliti BALITBANG (2006) Untuk mempercepat keberhasilan program pengentasan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2I) dibutuhkan pendekatan model komunikasi persuasif dari pihak pemerintah, sehingga masyarakat pedesaan memahami program tersebut. K2I ini yang terjun langsung adalah pemerintah pusat tidak mengikutsertakan institusi lokal dalam pelaksanaannya sehingga pendekatan yang dilakukan kurang efektif karena masyarakat miskin belum mengenal orang-orang yang akan membantu mereka memecahkan masalah. Sedangkan penelitian ini membahas program KMN Nagari yang mana memanfaatkan institusi lokal sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat nagari.

Berbeda lagi dengan penelitian Edison Ahmad *cit* Helmi (2006) dengan judul Strategi Bertahan Hidup Keluarga Miskin, dari hasil penelitian Helmi untuk menanggulangi masalah kemiskinan yaitu dengan jalan kursus dan pelatihan serta perbaikan terutama jalan untuk perluasan pemasaran hasil pertanian sehingga mudah dijangkau dengan menjual produksinya untuk meningkatkan kesejahteraan yang ditujukan bagi seluruh keluarga miskin. Sedangkan dengan penelitian ini peneliti ingin melihat apa saja strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program KMN, sehingga melalui program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menyediakan bantuan modal usaha bergulir yang hanya ditujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro dengan harapan masyarakat yang memiliki usaha mikro tersebut telah mengetahui bagaimana prospek usahanya ke depan, sehingga tidak ada lagi kegiatan pelatihan yang diberikan karena masyarakat yang memiliki usaha mikro tersebut dianggap telah mengetahui bagaimana menjalankan usaha yang telah bertahun-tahun digelutinya.

Hasil penelitian Nelvi (2007) strategi pengentasan kemiskinan melalui program P2FM, setelah diteliti ternyata ada yang berdampak negatif oleh masyarakat. Dampak negatif disebabkan karena program tersebut tidak kondusif terhadap sebagian masyarakat penerima bantuan (nelayan dan masyarakat pesisir) karena tidak partisipatif, tidak transparansi, kurang terjalin komunikasi hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya tidak melibatkan keluarga miskin untuk merumuskan kebutuhan mereka. Sedangkan penelitian ini peneliti ingin melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KMN dalam mengentaskan kemiskinan yang notabene bersifat *as-lokal as-possible (bottom-up)*.

Selanjutnya hasil penelitian Sri Munarti yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembalian dana Hibah Konservasi Desa ke Kas Konservasi Desa adalah persepsi responden terhadap dana HKD, berdasarkan jenis kegiatan, pengembalian dana berdasarkan status sosial dimasyarakat, dan berdasarkan tingkat keuntungan, sedangkan penelitian ini akan dilihat masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program KMN, dimana masalah yang banyak terjadi pada saat pengembalian kredit yang dilihat dari proses pelaksanaan program mulai dari identifikasi penerima program hingga pelaporan.

Hasil dari penelitian terdahulu oleh Zetrika dewi, Weni 2009 yang mengambil tempat di Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Yang mengatakan bahwa Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis nagari melalui program KMN masih belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Nagari Parit Malintang, Program ini justru menetaskan kemiskinan-kemiskinan baru bagi masyarakat yang sebenarnya tidak miskin. Hal ini disebabkan karena mekanisme dalam pelaksanaan Program KMN di Nagari Parit Malintang masih belum dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, dimana ketidaksesuaian tersebut menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan menghambat pelaksanaan program KMN di Parit Malintang.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena:

- Kelurahan Tabing Banda Gadang adalah Kelurahan yang pertama menerima dana KMN, sehingga penyaluran ke masyarakat pun lebih cepat.
- Dari 6 (enam) kelurahan yang mendapatkan dana kredit mikro nagari (KMN) di Kecamatan Nanggalo antara lain gurun laweh, kampung olo, kampung lapai, kurao pagang, tabing banda gadang, surau gadang. Tabing Banda Gadang adalah Kelurahan dengan tingkat kemacetan yang paling tinggi (lampiran 2).

Penelitian dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat rekomendasi dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011.

3.2. Metode dan Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kasus (*case study*) yaitu penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Nazir, 1988).

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (*Simple Random sampling*) untuk populasi penerima program KMN. dan Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) untuk Populasi *key informan* karena peneliti mempunyai pertimbangan – pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. target dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima Program KMN di Kelurahan Tabing banda gadang dan pihak pengelola dan pengwas dana KMN. Sudjana (1992) menjelaskan populasi adalah totalitas dari semua nilai yang mungkin atau pengukuran kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kelompok yang jelas dan lengkap yang ingin mempelajari sifat-sifatnya.

Menurut Surachman (1982) penentuan jumlah sampel, jika populasi kurang dari 100 diambil sebanyak 50%, apabila populasi antara 100 - 1000 diambil sebanyak 15 - 50% dan apabila lebih dari 1000 maka diambil sebanyak 10 - 15%. Banyaknya sampel yang diambil untuk penerima program KMN dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden yaitu 18,8% dari jumlah seluruh populasi yang menerima program kredit mikro nagari yaitu sebanyak 159 anggota penerima. Banyak sampel yang diambil untuk pihak *key informan* dalam penelitian ini adalah 10 responden yaitu 50% dari jumlah seluruh populasi yaitu sebanyak 16 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel Penerima KMN

No	Jenis usaha	Jumlah populasi	Sampel 18,8%
1	Pertanian	3 orang	3 orang
2	Perternakan	2 orang	2 orang
3	Dagang hasil pertanian	25 orang	5 orang
4	Dagang non hasil pertanian	110 orang	20 orang
	Total	140 orang	30 orang

Tabel 2 . Penentuan Jumlah Sampel *Key Informan*

Keyinformant	Jumlah populasi	Sampel 50%
1. Tim teknis/pokja	4 orang	2 orang
2. Lurah	3 orang	1 orang
3. Camat	1 orang	1 orang
4. BPM-PK Kota Padang	2 orang	1 orang
5. Ketua RT	4 orang	2 orang
6. Ketua RW	5 orang	3 orang
Total	20 orang	10 orang

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara kepada sampel masyarakat penerima Program KMN dan sampel *key informan* dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan, melalui pengamatan langsung terhadap sampel dan juga wawancara langsung.

2. Data Sekunder

Diperoleh dari data yang telah tersedia di Kantor lurah, Badan Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disingkat dengan BPM), Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Camat Nanggalo, selain itu juga diperoleh dari instansi-instansi, lembaga-lembaga terkait dan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

3.4. Variabel yang Diamati

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis kelurahan melalui Program KMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kota Padang.

a. Persiapan

1. Penetapan kelurahan penerima kredit mikro
2. Pembentukan tim teknis
3. Koordinasi program
4. Sosialisasi Program Kredit Mikro di kelurahan

b. Perencanaan

1. Identifikasi penerima bantuan
2. Penyusunan prioritas penerima program KMN
3. Penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis
4. Kesepakatan aturan modal bergulir

c. Pelaksanaan

1. Penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana
2. Proses pencairan dana KMN
3. Prosedur pengembalian dana
4. Pengawasan
5. Pelaporan

2. Menganalisis Faktor – Faktor Penyebab Kemacetan Kredit Mikro Nagari Di Kelurahan Tabing Banda Gadang. Menurut Mayrowarni dkk (1998), faktor yang mempengaruhi peminjam dalam mengembalikan kredit adalah *monitoring* yang

dilakukan petugas, kemudian peminjam dalam mengakses kredit, ketepatan waktu penyaluran, bentuk dan cara penagihan, pemahaman peminjam tentang kredit, kemampuan peminjam dalam mengelola kredit, dan kemampuan manajerial kelompok.

Maka variabel yang diamati adalah :

1. Aturan Peminjaman
 - a). Syarat anggota peminjam
 - b). Besar pinjaman dan bunga pinjaman
 - c). Kelompok awal dan kelompok tunggu
2. Aturan pengembalian
 - a). Jangka waktu pengembalian
 - b). Sanksi keterlambatan
 - c). Pengembalian diantar atau dijemput
3. Pengawasan
 - a). Pelaporan
 - b). Peninjauan langsung oleh fungsi pengawasan
 - c). Evaluasi dari peninjauan yang dilakukan

3.5. Analisa Data

Dari data primer dan sekunder dikumpulkan di lapangan sesuai tujuan penelitian, analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2003), analisa deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian.

Untuk dapat mencapai tujuan pertama, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis kelurahan melalui Program KMN di Tabing banda gadang dianalisa secara deskriptif kualitatif, ini ditujukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan, proses pemberian kredit mikro di Kelurahan Tabing banda gadang.

Untuk tujuan kedua, yaitu menganalisis masalah-masalah yang menghambat dalam pelaksanaan Program KMN di Tabing banda gadang dianalisa

secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan daftar quisioner dan wawancara secara mendalam kepada responden.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Letak Geografis

Kelurahan Tabing Banda Gadang merupakan salah satu Kelurahan dari 6 (enam) Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Kondisi geografis wilayah adalah dataran tinggi dengan luas kelurahan 0.91 Km², dan merupakan kelurahan terluas setelah kelurahan surau gadang dan kelurahan kurao pagang. Untuk lebih jelasnya pembagian luas wilayah menurut urutan terluasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Wilayah Kelurahan Menurut urutan terluas

No	Kelurahan	Luas (km ²)
1.	Kurao gadang	2.85
2.	Surau gadang	2.28
3.	Tabing Banda Gadang	0.91
4.	Gurun lawas	0.85
5.	Kampung olo	0.57
6.	Kampung lapai	0.61

Sumber: Monografi Kelurahan Tabing Banda Gadang Tahun 2009

Letak kelurahan berada di antara kecamatan dan propinsi dan tidak jauh dengan ibu kota propinsi. Secara terperinci Kelurahan Tabing Banda Gandang mempunyai jarak ke beberapa daerah sekitarnya sebagai berikut:

- Jarak ke ibu kota propinsi 3.00 Km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit,
- Jarak ke Provinsi 2.50 Km dengan waktu tempuh sekitar 9.5 menit,
- Jarak ke Kecamatan 1.5 km dengan waktu tempuh sekitar 5 menit

Kelurahan Tabing Banda Gadang bentuk tanahnya daratan dengan topografi/bentang lahan berupa dataran tinggi, memiliki warna tanah merah/kuning. Kelurahan ini memiliki curah hujan sekitar 387,3 mm/th dan suhu antara 21⁰C – 31⁰C dengan ketinggian 850 - 2699 m dari permukaan laut.

4.1.2. Sumber Daya Alam

Kondisi topografi yang berada di daerah dataran tinggi ini memiliki warna tanah merah/kuning dan tidak berawa sehingga sangat berpotensi untuk industri perumahan. Disatu sisi hal ini menguntungkan masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian, namun disisi lain terjadi penyempitan lahan

persawahan karena adanya kegiatan tersebut. Secara terperinci data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan Tabing Banda Gadang

No	Potensi Umum	Keterangan (ha)
1.	Tanah Sawah	1,092
2.	Tanah Kering	0,637
3.	Tegal / lading	1,274
3.	Perumahan	6,097

Sumber: Data Monografi Kelurahan Tabing Banda Gadang 2009.

4.1.3. Sumber Daya Manusia

Kelurahan Tabing Banda Gadang menurut data tahun 2009 mempunyai penduduk sejumlah 3,626 jiwa yang meliputi 1,790 jiwa laki-laki dan 1,836 jiwa perempuan dengan jumlah keseluruhan 849 KK. Apabila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk Kelurahan Tabing Banda Gadang tahun 2009 menurut kelompok umur, maka terlihat bahwa penduduk terbanyak pada kisaran umur produktif, yakni antara umur 26 – 49 tahun. Ini membawa konsekuensi pada tersedianya sumber daya tenaga kerja yang memadai di tingkat kelurahan karena jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur produktif. Ini tentu saja harus diantisipasi oleh aparat kelurahan dengan menyediakan lapangan kerja serta berbagai peluang lainnya. Secara terperinci, jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kelurahan Tabing Banda Gadang pada tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Perempuan	Laki-Laki	
1.	0-9 Tahun	571	507	1.078
2.	10-19 Tahun	205	240	445
3.	20-49 Tahun	799	881	1680
4.	> 60 Tahun	227	198	425
5.	Jumlah	1802	1824	3626

Sumber: Data Isian Monografi Kelurahan Tabing Banda Gadang, 2009.

4.1.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Keadaan Rumah Tangga Miskin di Tabing Banda Gadang Tahun 2009.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai hidup. Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan penting yang dihadapi oleh masyarakat

dan aparat kelurahan. Jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Tabing Banda Gadang adalah urutan ketiga dibandingkan dengan enam kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Naggalo, yaitu setelah kelurahan kurao pagang dan kampung lapai, dimana dari 13% jumlah penduduknya adalah masyarakat miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 6.

Tabel 6 : Data Masyarakat Miskin Di Kecamatan Naggalo Kota Padang.

No	Kelurahan	Jumlah penduduk (orang)	Penduduk miskin		
			Rtm	Jiwa	%
1	Kurao pagang	11.447	489	2.583	22,5
2	Tabing Banda Gadang	3.626	85	479	13,2
3	Surau gadang	23.341	423	2.066	8,8
4	Gurun laweh	2.368	42	264	11,1
5	Kapung olo	7.373	87	442	5,9
6	Kampung lapai	11.696	424	2.072	17,71

Sumber : data olahan BPM-PK 2009

4.2. Identitas Responden

4.2.1. Identitas Penerima Program KMN Tahun 2009

Umur responden penerima dana KMN di Tabing Banda Gadang terbesar pada kelompok umur 30 – 49 tahun jumlahnya 26 orang (86%). Sedangkan persentase umur penerima dana antara 15 – 29 yaitu 4% dan lebih dari 50 tahun 10%, secara umum di Indonesia rata- rata umur kepala keluarga dari rumah tangga miskin adalah 46 tahun, berarti kepala keluarga miskin penerima KMN sama dengan umur kepala keluarga miskin pada umumnya di Indonesia. Tingkat pendidikan responden umumnya SD (14 orang/47%). Pengalaman berusaha responden lebih banyak antara <1 tahun yaitu 12 orang (40%). Kedudukan responden penerima dana KMN umumnya sebagai masyarakat biasa yakni sebanyak 25 orang (83,3%). Uraianannya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Identitas Responden Penerima Program KMN Tahun 2009

No	Uraian	Jumlah (orang)	% jumlah
1.	Umur responden		
	15-29	1	4
	30-49	26	86
	>50	3	10
2	26	Jumlah (orang)	% jumlah
	Tidak tamat SD	1	3
	Tamat SD	14	47
	Tamat SLTP	12	40
	Tamat SLTA	3	10
3.	Pengalaman berusaha (tahun)	Jumlah (orang)	% jumlah
	<1	12	40
	1-3	7	23,3
	4-6	9	30
	>6	2	6.7
4	Kedudukan di masyarakat	Jumlah (orang)	% jumlah
	Tokoh masyarakat	5	16.7
	Masyarakat biasa	25	83.3

Sumber: Data Olahan, 2008

4.2.2. Identitas Key informan

Umur responden key informan berada diantara umur 30-49 tahun dan umur >50 tahun, dimana umur 30-49 tahun sebanyak 44.4% dan umur >50 tahun itu sebanyak 55.6%. Tingkat pendidikan responden umumnya lulusan perguruan tinggi, dan sisanya adalah lulusan SLTA. Kedudukan responden penerima dana KMN paling banyak adalah sebagai pengurus KMN/pokja yakni sebanyak 4orang (44.5%). Uraianya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Identitas Responden Pemberi (Tim Teknis/Pokja) Dana KMN Tahun 2009.

No	Uraian	Jumlah (orang)	% jumlah
1.	Umur responden		
	30-49	4	40
	>50	6	60
2	Pendidikan	Jumlah (orang)	% jumlah
	Tamat SLTP	-	-
	Tamat SLTA	3	30
	Perguruan Tinggi	7	70
4	Kedudukan di masyarakat	Jumlah (orang)	% jumlah
	Pengurus KMN/ pokja	2	20
	Lurah	1	10
	Camat	1	10
	BPM-PK Kota Padang	1	10
	RT	2	20
	RW	3	30

Sumber: Data Olahan, 2008

4.3. Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kelurahan Melalui Program KMN Di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kota Padang.

Program KMN merupakan program yang dirancang untuk mengikuti arahan kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pencapaian target *Milenium Development Goals (MDGS)*¹. KMN adalah program yang diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari pemerintah propinsi ke kabupaten/kota selanjutnya di sosialisasikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan diteruskan ke kelurahan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan.

Program KMN pada intinya merupakan program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk memberikan stimulasi modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat kelurahan agar mampu berkembang dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatannya dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan. Untuk memperlancar implementasi program ini, maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (selanjutnya akan disingkat dengan TKPK) Kota Padang memberikan dana operasional kepada pokja kelurahan sejumlah 7,5 juta rupiah. Berdasarkan temuan lapangan, dana ini dibagi realisasinya untuk honor pokja, honor wali kelurahan dan operasional kegiatan (konsumsi rapat, ATK dll).

Adapun berikut ini merupakan hasil yang di dapat dari peneliti di lapangan:

Dengan merujuk pada buku petunjuk teknis (Juknis) Bantuan Kredit Mikro Kelurahan, maka implementasi program KMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang mencakup tiga tahapan inti, yakni : (1) Tahap Persiapan, (2)Perencanaan Program dan (3) pelaksanaan.

4.3.1. Persiapan

Di Kelurahan Tabing Banda Gadang dalam proses persiapan masih ada tahapan yang belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program diantaranya adalah pembentukan tim koordinasi penangulangan kemiskinan (TKPK) untuk membina, mengendalikan dan mengkoordinasi pengelolaan program serta memantau kemajuan pelaksanaan penetapan nagari

penerima Program KMN, kegiatan koordinasi program dan kegiatan sosialisasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Persiapan Program KMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang dengan Juknis.

Kegiatan	Juknis	Di lapangan	Keterangan
Pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	1. TKPK Provinsi 2. TKPK Kabupaten/ Kota. 3. Pokja Kecamatan dan Kelurahan	- Tidak ada Pokja Kecamatan	Tidak sesuai, juknis
Sosialisasi Program KMN tingkat nagari/ kelurahan	- Tokoh masyarakat, ninik mamak, pemerintah nagari/Kelurahan - Pertemuan kelompok masyarakat di tingkat jorong/RT dan RW	- Pokja, RT dan RW serta Masyarakat calon penerima.	Tidak sesuai karena tidak ada dihadiri oleh pihak kelurahan

4.3.1.1. Penetapan Kelurahan Penerima Bantuan Kredit Mikro Nagari 2007

Pada tanggal 25 Juni 2007 sesuai dengan surat edaran Gubernur Propinsi Sumbar No. 134/III/PKSDM-PK/Bappeda/2007 ttg. Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari. Maka muncullah daftar kelurahan penerima dana kredit mikro nagari salah satunya adalah Kelurahan Tabing Banda Gadang. Dari hasil wawancara dengan salah seorang aparatur BPM-PK Kota Padang, bahwa 24 kelurahan yang masuk kedalam daftar penerima kredit mikro nagari adalah hasil dari seleksi yang dilakukan oleh Provinsi Sumbar. Dengan kata lain kelurahan Tabing Banda Gadang ditetapkan sebagai kelurahan penerima dana kredit mikro nagari merupakan usulan dari pemprov sumbar.

4.3.1.2 Pembentukan Tim Teknis/Pokja

Setelah kelurahan Tabing Banda Gadang ditetapkan sebagai kelurahan penerima dana Kredit Mikro Nagari seharusnya apabila merujuk pada Juknis KMN 2007, maka dilakukan pembentukan POKJA Kecamatan dan POKJA kelurahan, tetapi di kelurahan Tabing Banda Gadang hanya dibentuk POKJA

kelurahan saja. Menurut salah seorang aparatur Kecamatan, mengatakan itu dilakukan karena, letak Kecamatan Nanggalo dengan Kelurahan Tabing Banda Gadang itu dekat, sehingga pelaporan tentang perkembangan dana KMN dapat langsung dilakukan oleh POKJA Kelurahan. Pokja kelurahan dibentuk dengan tujuan :

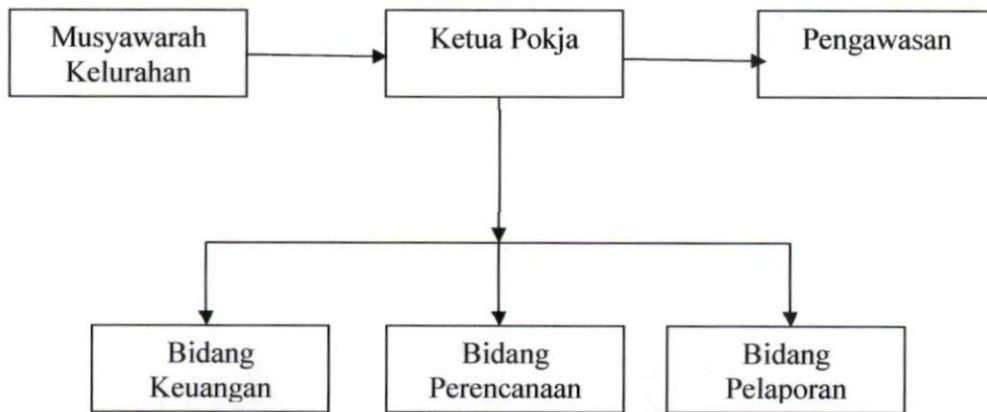
- a. Menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Program KMN
- b. Menampung usulan kegiatan dan usulan calon penerima KMN.
- c. Bersama masyarakat menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon penerima kredit mikro kelurahan.
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pencairan dana kepada TKPK-Kabupaten/Kota.

Tabel 10. Pokja Pelaksana Kredit Mikro Nagari, Kelurahan Tabing Banda Gadang

No	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN DALAM POKJA
1	ASRIL	Lurah	Penanggung jawab
2	1. Ir. Reiner Dt. In. Bth 2. Drs. Sulaiman Kasim 3. Asmadi, SH	Ketua LPM	Penasehat
3	H. Ridwan Syamsudin, SH, MBA	Seksi Ekonomi LPM	Ketua
4	Sudirman	Kasi pemberdayaan	Fungsi Pelaporan
5	Buk Eni	Pengurus PKK kelurahan	Fungsi keuangan
6	Jhoni Putra, ST	Pengurus karang taruna	Fungsi perencanaan
7	Syamsir Syafri, SP Drs. Nasrun Dj Wahyu Irdiansyah Ali Amran Mukni Said Anis Aziz Drs. Akrinier Ardi Syafri Jamaris Hendri Zunan Nasrul Syafri Yefri, S,sos	Ketua RT/RW se- kel Tabing Banda Gadang	Fungsi pengawasan

Pokja kelurahan yang terbentuk pada tanggal 12 November 2007, sesuai dengan SK Lurah Tabing Banda Gadang Nomor : 172/SK/TBG-PM/XI-2007, tentang pembentukan pokja pelaksana Kredit Mikro Nagari Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo yang dihadiri oleh 20 orang peserta rapat (lampiran 3) pokja yang terbentuk adalah seperti yang terlihat dalam Tabel 10 dan Gambar 1 diatas.

Untuk melihat proses mekanisme kerja oleh POKJA dalam KMN pada Kelurahan Tabing Banda Gadang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Bagan Organisasi Pokja Kelurahan Tabing Banda Gadang.

4.3.1.3. Koordinasi Program

Setelah itu sesuai dengan juknis KMN 2007, dilakukanlah sosialisasi dan koordinasi program KMN dengan instansi terkait. Pertemuan dilakukan di Pusdiklat Bhakti Bunda jl. Asahan No. 2 Komplek Gor H. Agus Salim Padang Baru – Padang, pada tanggal 12 september 2007. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh TKPK Kota Padang, camat dari 6 kecamatan di kota padang, lurah dari 24 kelurahan, dan pokja masing – masing kelurahan. Pertemuan seharian penuh ini juga dihadiri oleh Dinas Sosial, PBM-PK Kota padang, sekda dan Bapeda.

4.3.1.4. Sosialisasi Program KMN Di Kelurahan Tabing Banda Gadang

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan dan menginformasikan suatu kegiatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tergantung arti pentingnya perencanaan kegiatan sebagai dasar pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara

berkelanjutan dan lestari (Asyik, 2002). Di Kelurahan Tabing Banda Gadang Proses sosialisasi Program KMN dilaksanakan secara formal oleh pokja dengan metode ceramah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2007 bertempat di sebuah mushala yang berada ditengah - tengah kelurahan materi yang disampaikan adalah tata cara pelaksanaan Program KMN Dalam sosialisasi ini masyarakat yang hadir lebih kurang sebanyak 60 orang dan tidak dihadiri oleh aparatur dari kelurahan. Selanjutnya dilakukan diskusi antara masyarakat dengan pokja mengenai hal-hal yang belum dipahami oleh masyarakat.

Selanjut pengurus KMN/POKJA mengundang masyarakat yang tidak hadir pada waktu pertemuan itu, untuk datang langsung kerumah bendahara pokja yang juga merupakan istri dari ketua RT, untuk menanyakan hal – hal yang dirasa ragu dan tidak mengerti.

Pada tahap persiapan semua biaya operasional sementara ditanggungkan dulu oleh pokja sebelum dana operasional dari propinsi turun, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi pokja untuk menjalankan tugas. Pada bulan Desember 2007 dana operasional turun sebesar Rp. 7.600.000; Dana ini digunakan antara lain: pembuatan kartu cicilan, foto copy, surat blanko, stempel, matrai, biaya konsumsi rapat, dan honor pengurus.

4.3.2. Perencanaan

Selama proses perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang belum sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program dimana ketidak sesuaian tersebut tentunya akan menimbulkan masalah selama pelaksanaan program KMN. Kegiatan Perencanaan itu menurut juknis KMN 2007 meliputi, identifikasi penerima bantuan, penyusunan prioritas, penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis, penjangkaran calon penerima dana KMN, kesepakatan aturan modal bergulir. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 11.

Tabel 11. Perencanaan Program KMN di Tabing Banda Gadang dengan Juknis.

Kegiatan	Juknis	Di lapangan	Keterangan
1. Identifikasi Penerima dana KMN	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat miskin yang mempunyai usaha mikro, - Usaha sudah berjalan jauh sebelum adanya Program KMN, - Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha - Masyarakat miskin yang mempunyai usaha mikro - Usaha sudah berjalan dan terlembaga jauh sebelum adanya Program KMN - Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha 	- Mendaftar dan diberi pinjaman, tidak ada identifikasi usaha seperti didalam Juknis	Tidak Sesuai, karena tidak ada identifikasi.
2. Penyusunan prioritas penerima dana KMN	<ul style="list-style-type: none"> - KK miskin 70% dan Non RTM 30% yg punya usaha kecil dan mikro - Mempunyai tanggungan anggota keluarga yang banyak - Kelompok usaha yang sudah ada dan terlembaga - Dana diperuntukan bagi <i>penambahan modal</i> - Usaha yang cepat menghasilkan 	-RTM diprioritaskan untuk mendaftar tapi tidak ada presentase untuk RTM seperti didalam Juknis	Tidak Sesuai, Karena tidak ada penyusunan prioritas penerima dana KMN
3. Penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis	secara administratif dan verifikasi langsung ke lapangan	Mendaftar dan melakukan perjanjian secara lisan untuk membayar angsuran dan diusahakan tidak ada tunggakan	Tidak sesuai Juknis karena tidak ada penilaian kelayakan usaha
4. Kesepakatan aturan modal bergulir nagari	<p>Musyawarah nagari/ Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kelompok awal dan kelompok tunggu - Lamanya angsuran - Sanksi sosial - Dana bergulir harus dibayar kembali dengan tanpa bunga dan jadwal pengembalian sesuai dengan yang disepakati 	<p>Musyawarah Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> -menetapkan lamanya angsuran yaitu selama 10 bulan - Tidak bunga pinjaman - Simpanan wajib peminjam 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai, karena tidak ditetapkannya sanksi. Tidak adanya aturan kelompok awal dan tunggu.

4.3.2.1. Identifikasi Penerima Dana KMN

Di Kelurahan Tabing Banda Gadang identifikasi calon penerima dana modal bergulir KMN ini tidak sama sekali dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk di Kelurahan Tabing Banda Gadang, karena dari hasil wawancara dengan anggota penerima dana kredit mikro nagari, bahwa mereka menjadi anggota penerima karena datang kerumah bendahara KMN dan mendaftar, walaupun mereka belum punya usaha yang sudah berjalan lebih dari satu tahun seperti aturan yang ada didalam juknis KMN 2007. Bahkan dari hasil wawancara dengan anggota penerima dana KMN, ada beberapa diantara mereka yang dibujuk untuk meminjam dana kredit mikro nagari padahal sebelumnya mereka tidak berkeinginan untuk melakukan pinjaman. Menurut wawancara dengan pengurus itu dilakukan, karena pengurus takut nanti ada dana yang berlebih dan tidak dipinjam oleh masyarakat sehingga harus dikembalikan lagi ke pemerintah.

Dari data penerima pinjaman dana kredit mikro nagari tahun 2007 ada 159 anggota peminjam, dimana yang paling banyak meminjam adalah anggota dengan jenis usaha dagang non hasil pertanian yaitu sebanyak 114 orang dan peminjam dengan jenis usaha dagang jenis hasil pertanian yaitu sebanyak 31 kemudian sisanya adalah peminjam dengan jenis usaha bertani dan berternak. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 12.

Tabel 12. Anggota Peminjam Dana Kredit Mikro Nagari

No	Jenis usaha	Jumlah populasi
1	Pertanian	3 orang
2	Perternakan	2 orang
3	Dagang hasil pertanian	31 orang
4	Dagang non hasil pertanian	123 orang
	Total	159 orang

4.3.2.2. Penyusunan Prioritas

Apabila mengacu kepada juknis KMN 2007, maka setelah dilakukan identifikasi terhadap calon penerima program tahap selanjutnya penyusunan prioritas, kegiatan ini pada intinya memuat proses seleksi secara objektif dengan

indikator tertentu secara transparan terhadap seluruh usulan jenis usaha dan kelompok individu calon penerima bantuan permodalan. Tetapi dari temuan di lapangan hal itu tidak dilakukan oleh pengurus KMN/POKJA sesuai dengan aturan yang ada dalam juknis KMN 2007, karena dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus tidak ada seleksi untuk menjadi anggota peminjam, apabila ada masyarakat yang datang untuk meminjam tidak ada yang tidak menerima pinjaman dengan syarat dana KMN masih ada untuk dipinjamkan. Tetapi bila tidak ada maka calon peminjam diharapkan menunggu sampai dana tersebut ada dan bisa untuk dipinjamkan.

4.3.2.3. Penilaian Kelayakan Usaha

Dalam petunjuk teknis penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis merupakan suatu tahap yang harus dijalani bagi penerima Program KMN untuk mengetahui layak atau tidaknya seseorang menerima Program KMN tersebut. Apabila mengacu pada juknis KMN 2007, usaha yang dianggap layak adalah usaha yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun atau memiliki pengalaman usaha yang lebih dari satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota penerima pinjaman dana KMN, penilaian kelayakan usaha tidak dilakukan karena dari 30 responden yang menerima dana KMN 12 diantaranya adalah peminjam dengan pengalaman usaha kurang dari satu tahun. Seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Pengalaman Usaha Responden Peminjam Dana KMN

No	Pengalaman usaha	Jumlah responden
1	< 1 tahun	12 orang
2	1 sampai 3 tahun	7 orang
3	4 sampai 6 tahun	9 orang
4	Lebih dari 6 tahun	2 orang

4.3.2.4. Kesepakatan Aturan Modal Bergulir Kelurahan

Dari hasil wawancara dengan penerima dana pinjaman kredit mikro nagari, bahwa kesepakatan diterima atau diketahui pada saat peminjaman dilakukan dengan kesepakatan sederhana yaitu peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 10 bulan dan tidak dikenakan bunga, kemudian peminjam disuruh mengisi surat perjanjian yang hanya dipegang oleh pihak pokja.

Tidak ada pembicaraan tentang sanksi, tetapi setelah perguliran dana KMN tahap II yaitu pada tanggal 10 September 2009, pihak pokja menyampaikan kalau dari pinjaman yang dilakukan oleh anggota itu dikenakan potongan untuk tabungan dan besarnya berbeda – beda untuk setiap peminjam.

4.3.3. Pelaksanaan

Pada Tahap pelaksanaan Program KMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang masih belum semua dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Seharus pelaksanaan program KMN sesuai dengan JUKNIS KMN 2007 seperti ada pada Tabel 14.

Tabel 14. Pelaksanaan Program KMN di Tabing Banda Gadang dengan Juknis.

Kegiatan	Juknis	Di lapangan	Keterangan
1. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - TKPK-P = Rabu I / bulan - TKPK-K = Rabu IV/bulan - Pokja nagari dan Kelompok tunggu = senin I & III/bulan - Kelompok penerima bantuan = setiap jumat 	<ul style="list-style-type: none"> - TKPK-K = 2x pada saat perencanaan dan pelaksanaan - TKPK-K = 1x dilakukan secara global - Dengan bertanya kepada pengurus 	<p>Tidak sesuai</p> <p>Karena tidak ada pengawasan dari TKPK-P dan tidak ada pengawasan yang dilakukan Pokja</p>
2. Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok penerima program ke pokja = setiap jumat - Pokja nagari ke TKPK-K = selasa minggu I dan II (20 Desember) - TKPK-K ke TKPK-P = senin minggu I dan II, Januari 2008 - TKPK-P ke Gubernur = Minggu IV Januari 2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Pokja Kelurahan ke TKPK-K 	<p>tidak sesuai karena :</p> <p>tidak ada laporan kelompok ke Pokja</p>

4.3.3.1. Penyusunan dan Pengajuan Dokumen Pencairan Dana

Dokumen pencairan Dana terdiri dari surat permohonan izin penyaluran dana KMN (Lampiran 4), Berita Acara Musyawarah Kelurahan (Lampiran 5), daftar naman-nama kelompok penerima dana KMN dari dana APBD Propinsi Sumatera Barat, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No: 01 / POKJA / PM-2008 bulan Januari 2008 (Lampiran 6). Dokumen pencairan dana diajukan oleh ketua pokja Kelurahan Tabing Banda Gadang pada tanggal 20 Februari 2008

kepada Kepala BPM-PK Kota Padang, perihal: Mohon izin pencairan dana KMN tahap I, diketahui Lurah Tabing Banda Gadang, dokumen pencairan dana ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar dana KMN bisa dicairkan.

4.3.3.2. Proses Pencairan Dana KMN

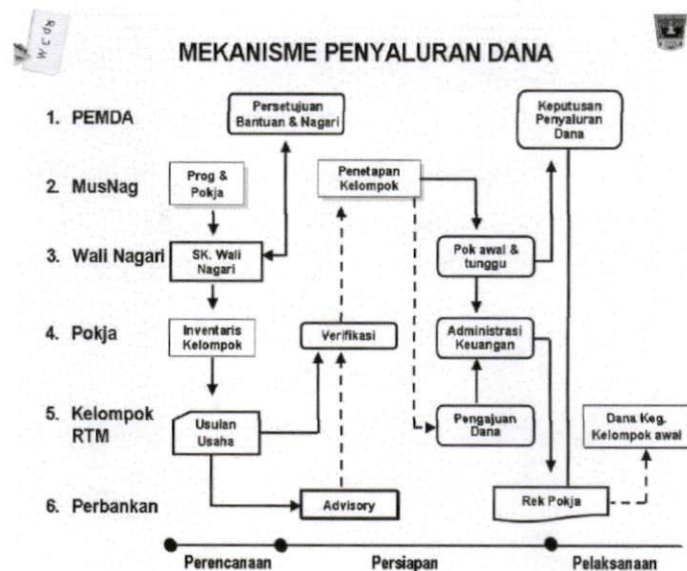
Dari hasil wawancara dengan salah seorang pengurus KMN/pokja yang mengatakan proses penyaluran dana ke lembaga perbankan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2008 dengan syarat harus ada surat rekomendasi dari BPM. BPM bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna memberikan surat rekomendasi ke BPD untuk dicairkan dana sebesar Rp. 150.000.000 (50% dari dana yang dialokasikan ke kelurahan). Selanjutnya pencairan dana dilakukan oleh pokja kelurahan pada akhir April 2009 dengan membawa surat rekomendasi dari BPM. Kemudian pokja membuat rekening baru dimana dalam kebijakan pemerintah dana harus sudah masuk ke rekening pokja Tahapan pencairan dana Program KMN dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap penarikan, yaitu tahap I untuk modal bergulir setinggi-tingginya 50% (Rp.150.000.000) tujuannya untuk mengetahui tingkat keseriusan kelurahan dalam proses perguliran dana sehingga resiko kegagalan program dapat diperkecil. Tahap II apabila kredit tahap I telah disalurkan mencapai 90% dan kinerja pengembalian sudah sesuai dengan yang direncanakan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah semua administrasi selesai proses penyaluran dan pencairan dana KMN oleh pokja selesai dalam satu hari karena Ketua Pokja Tabing Banda Gadang seksi ekonomi LPM sehingga memperoleh informasi lebih jelas mengenai persyaratan-persyaratan pencairan dana sehingga administrasi dan birokrasi lebih cepat selesai dibandingkan kelurahan yang lain. Pada hari yang sama dana KMN sudah bisa disalurkan ke kelompok usaha yang sudah ditetapkan/diajukan, dimana besar pinjaman tiap-tiap kelompok berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

Proses pencairan dana KMN ini sudah sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam petunjuk teknis KMN 2007.

Untuk Tahap I pinjaman tertinggi yaitu Rp. 6.000.000,00. Sedangkan pinjaman terendah yaitu Rp. 500.000,00 dengan jumlah anggota peminjam adalah 159 orang .

Untuk lebih jelasnya mekanisme penyaluran dana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana

Keterangan Gambar 2.

1. Pada tahap perencanaan yaitu adanya rekomendasi dari Pemda berupa persetujuan bantuan untuk kelurahan dan menyiapkan dana sebesar dana yang diberikan propinsi kepada daerah untuk program KMN.
2. Musyawarah kelurahan, membahas tentang program dan membentuk pokja yang dihadiri oleh elemen masyarakat kelurahan (tokoh masyarakat, cadiak pandai, niniak mamak, bundo kandung, dll)
3. Lurah menyetujui program KMN dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap pembentukan pokja dengan nomor 172/ SK / TBG-PM / XI / 2007 tentang Pengukuhan Pokja Kelurahan Kelurahan Tabing Banda Gadang Tahun 2007 tanggal 12 November 2007.

4. Pokja bersama Lurah melakukan inventaris kelompok, mengklasifikasikan jenis usaha yang ada dan membaginya berdasarkan kelompok.
5. Kelompok rumah tangga mengajukan usulan usaha kepada pokja.
6. Pada tahap persiapan pokja melakukan verifikasi terhadap usulan usaha yang diajukan masyarakat miskin yang dibantu oleh Lurah dan menetapkan kelompok yang layak menerima dana KMN.
7. Masyarakat miskin yang mendapat kesempatan menerima dana pinjaman KMN dibagi dua kelompok yaitu kelompok awal dan kelompok tunggu, dan mengajukan besarnya dana pinjaman kepada pokja.
8. Masyarakat miskin penerima dana KMN harus menyelesaikan administrasi keuangan berupa penandatanganan surat perjanjian di atas materai yang diketahui oleh ahli waris.
9. Pada tahap pelaksanaan setelah administrasi keuangan selesai dan diajukan ke kantor BPM berupa dokumen pencairan dana, dana KMN sebesar Rp.300.000.000 sudah bisa dicairkan ke rekening pokja.
10. Dana dicairkan ke kelompok awal, setelah penyalurannya selesai untuk tahap 1, maka dilanjutkan dengan pencairann dana untuk tahap 2.

Syarat yang harus ada sewaktu pencairan dana adalah mengisi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No 06 / PKM-TBG /2008 dari pihak pertama yaitu pokja kepada ketua kelompok sebagai pihak kedua, yang ditanda tangani oleh ketua kelompok, dan ketua Pokja Tabing Banda Gadang. Selanjutnya ketua kelompok menerima kwitansi dari pokja berisi sejumlah dana yang dipinjam dan ditanda tangani oleh ketua kelompok di atas materai 6000, ini dilakukan untuk memperkuat status dana bahwa dana ini bukan dana lepas tapi merupakan pinjaman yang harus dikembalikan, tanda tangan yang menyerahkan dalam hal ini adalah bendahara dan diketahui oleh Wali Kelurahan Tabing Banda Gadang.

Selanjutnya pokja menyerahkan dana KMN ini kepada anggota kelompok yang telah ditetapkan, dan sekaligus penjelasan pengembalian cicilan sebanyak 10 – 20 kali tergantung kesepakatan dengan masing-masing peminjam yang dimulai pada bulan Maret 2008.

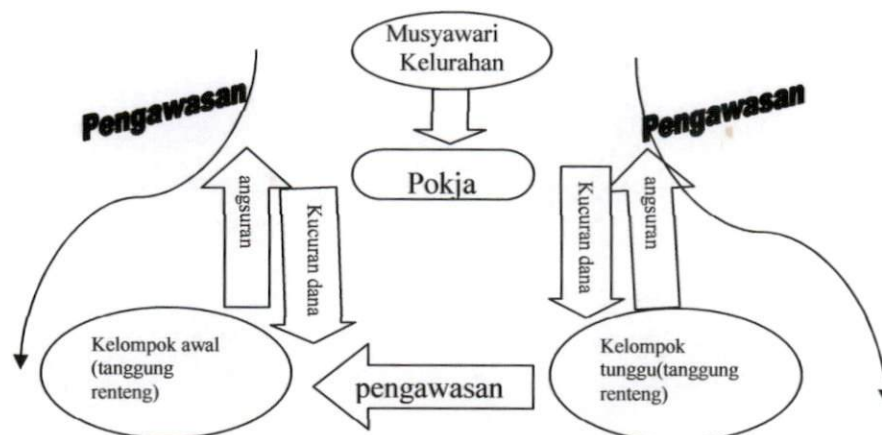
Peminjaman dana KMN ini kepada masyarakat miskin dibebankan jasa administrasi sebesar 5% selama pinjaman (20 bulan) yang dipotong langsung pada waktu penyerahan kredit ke masyarakat, sedangkan dalam petunjuk teknis tidak ada aturan mengenai bunga. Berdasarkan penelusuran informasi dengan anggota pokja bahwa jasa administrasi ini digunakan untuk pengembangan dana KMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang dan untuk jasa pengelola (POKJA), namun setelah dikonfirmasi kepada pihak pengelola berapa besar dana yang diterima setiap bulan, semua pokja menjawab jasa pengelola baru diterima satu kali selama program berjalan di luar dari dana BOP yaitu sebesar Rp. 100.000/orang dan Rp.400.000 untuk biaya transportasi pokja.

Menurut ketua pokja tugas yang dimanakan ini termasuk kegiatan sosial sehingga tidak terlalu mengharapkan imbalan jasa dari kegiatan KMN. Menurut Teguh (2009) insentif bagi pengurus sangat penting untuk menjaga kelestarian organisasi pengurus. Banyak program-program pengentasan kemiskinan yang bubar setelah ditinggalkan oleh pendamping, dan akibatnya dana yang besar tersebut hilang dari peredaran. Meskipun program KMN merupakan kegiatan sosial namun tetap diperlukan mekanisme kerja yang jelas, aturan main organisasi yang baik. Mekanisme kerja yang jelas dan aturan main tersebut harus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Siapa yang mau bekerja jika tidak ada jaminan untuk keberlanjutan administratif dan fasilitas termasuk uang lelah, jika dilihat dalam juknis telah disusun mengenai insentif pengurus, namun pada saat pelaksanaan dana ini tidak ada turun sedikitpun, hal ini menandakan ada inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan program. Kalau dilihat dari laporan pengembalian dana Kredit Mikro Nagari di Kelurahan Tabing Banda Gadang, sebanyak 140 orang anggota peminjam adalah macet. Tetapi saat diwawancarai, sebagian responden mengatakan bahwa mereka telah melunasi pinjaman mereka tersebut, tetapi enggan untuk melanjutkan pinjaman mereka karena pengurus KMN selalu mengatakan bahwa dana KMN belum ada dengan alasan banyak yang menunggak.

4.3.3.3. Prosedur Pengembalian Dana KMN

Di Tabing Banda Gadang pengembalian kredit dibayar langsung dari peminjam kepada kasi keuangan (bendahara). Pada waktu pengembalian dana ini

anggota penerima dana KMN menandatangani kartu catatan (kartu cicilan) yang berisi bukti pembayaran. tujuannya agar tidak ada kesalahan pencatatan yang dapat merugikan sebelah pihak, kartu cicilan hanya ada pada bendahara. Dari hasil wawancara dengan salah seorang pengurus KMN/pokja, setelah dana terkumpul maka dana tersebut disalurkan langsung kepada anggota kelompok tunggu sehingga dana tersebut bergulir, seperti yang terlihat pada gambar 3.



Gambar 3. Prosedur Pengembalian Dana

Sumber : Juknis KMN, 2007

Keterangan Gambar 3:

1. Musyawarah Kelurahan mengenai pengembalian dana.
2. Pokja menjalankan tugas dalam hal penyaluran dana ke kelompok awal dan menerima angsuran dana dari kelompok awal tiap bulan. Pokja fungsi keuangan mengisi kartu cicilan setiap kali anggota penerima program kredit mikro nagari melakukan pembayaran
3. Selanjutnya dana yang diterima tiap bulan dari kelompok awal dikumpulkan untuk dikucurkan ke kelompok tunggu dan kelompok tunggu memberikan angsuran tiap bulan kepada pokja.
4. Kelompok tunggu melakukan pengawasan terhadap kelompok awal tujuannya untuk mengetahui kapan kelompok tunggu mendapatkan kesempatan memperoleh pinjaman.

5. Kelurahan melakukan pengawasan terhadap kelompok awal dan kelompok tunggu, untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat terhadap dana bergulir ini, yang dilakukan oleh wali korong.

Gambar diatas merupakan kondisi ideal proses pengembalian dana kredit mikro nagari. Tetapi di kelurahan Tabing Banda Gadang, dari hasil wawancara dengan anggota penerima, bahwa banyak anggota penerima yang telah melunasi pinjamannya tetapi belum juga bisa melakukan pinjaman kembali, begitu juga dengan anggota yang telah lama menunggu.

4.3.4. Pengawasan

Di Kelurahan Tabing Banda Gadang menurut SK Lurah Nomor : 172/SK/TBG-PM/XI-2007, pengawasan penggunaan dana ini dilakukan oleh, ketua RT dan RW, pokja dan TKPK propinsi. Tetapi hasil yang ditemui dilapangan Ketua RT dan Ketua RW kehilangan fungsi karena tidak ada pelaporan dari pokja bahwasanya ada anggota RT atau anggota RW mereka yang melakukan pinjaman dana kredit mikro nagari. Fungsi pengawasan hanya dilakukan oleh TKPK Kota. Seharusnya TKPK Kota melakukan proses pengawasan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan yang bertujuan untuk melihat usaha kelompok masyarakat tersebut apakah ada perkembangan usaha seperti hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan tersebut adalah keluarga miskin mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak bergantung lagi pada orang lain., tetapi TKPK Kota hanya melakukan peninjauan terhadap pembukuan pokja yaitu laporan pengembalian dana kredit mikro nagari oleh anggota peminjam.

Dalam petunjuk teknis prosedur pemantauan dilakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat propinsi sampai pada tingkat kelompok penerima bantuan kredit, kegiatan pemantauan yang dilakukan baik dari TKPK-propinsi maupun TKPK-kabupaten/kota yang mana pada perencanaan akan dilaksanakan pada hari rabu minggu pertama setiap bulan untuk propinsi dan pada minggu ke IV setiap bulan untuk kabupaten/kota.

Namun di Kelurahan Tabing Banda Gadang TKPK propinsi tidak pernah melakukan pengawasan, yang melakukan pengawsan hanya TKPK Kota tetapi tetap juga tidak mengacu kepada juknis KMN 2007. TKPK Kota melakukan

pengawasan ke kelurahan Tabing Banda Gadang baru sebanyak empat kali sampai tahun 2009 atau sampai penyaluran dana kredit mikro nagari tahap II.

Temuan di lapangan juga memperlihatkan bahwa tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh pokja terhadap keluarga miskin baik untuk meninjau perkembangan usahanya maupun untuk mendengar keluhan masyarakat. Sedangkan dalam petunjuk teknis pokja harus mengawasi setiap 2 minggu. Hal ini perlu ditinjau ulang oleh ketua pokja untuk lebih mengerahkan anggotanya khususnya fungsi pengawasan agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang di amanatkan. Anggota kelompok juga tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membicarakan perkembangan usaha apalagi memantau anggota yang belum membayar cicilan. Menurut responden yang diwawancarai, hal ini sulit dilakukan karena masing-masing stakeholder mempunyai kesibukan dan menganggap tidak ada waktu untuk membahas masalah tersebut.

4.3.5. Laporan Pelaksanaan Program Kredit Mikro Kelurahan

Hasil wawancara dengan anggota pokja yang mengatakan Program KMN ini dilaporkan kepada BPM-PK Kota Padang. Kegiatan yang dilaporkan yaitu seluruh rangkaian program mulai dari awal sampai akhir yaitu laporan tentang pembentukan pokja yang disahkan lewat keputusan Lurah (Lampiran 7), memberikan laporan tentang dokumentasi pencairan dana antara lain memberikan daftar nama-nama kelompok masyarakat miskin penerima dana KMN, memberikan laporan bahwa surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, memberikan laporan bahwa musyawarah kelurahan telah selesai dilaksanakan berupa berita acara musyawarah kelurahan tentang penetapan nama-nama kelompok penerima bantuan Kredit Mikro Kelurahan, memberikan laporan pengelolaan KMN dan juga yang dilaporkan adalah persentase cicilan tiap bulan.

Di kelurahan Tabing Banda Gadang, dari hasil wawancara dengan bendahara pokja bahwa pelaporan dilakukan setiap bulan dan sesuai dengan JUKNIS KMN 2007. Tetapi peneliti tidak berhasil menemukan bukti karena ketika ditanya di BPM-PK Kota Padang, mereka menjawab bahwa berkas tersebut hilang karena gempa, yang tersisa hanya berkas 2009. Dan ketika ditanya kepada pengurus KMN/pokja mereka juga tidak menemukan dokumen tentang itu yang

ada hanya dokumen 2009. Sehingga data pelaporan yang didapatkan adalah pelaporan tahun 2009 yaitu laporan perkembangan dana KMN.

4.4. Menganalisis Faktor – Faktor Penyebab Kemacetan Kredit Mikro Nagari Dikelurahan Tabing Banda Gadang.

4.4.1. Aturan Peminjaman

4.4.1.1. Syarat Menjadi Anggota Peminjam Dana KMN

Di Kelurahan Tabing Banda Gadang, tidak ada syarat khusus untuk jadi anggota peminjam dana KMN. Masyarakat Tabing Banda Gadang cukup pergi ketempat pengurus (bendahara Pokja) dan mendaftar menjadi anggota. Tetapi apabila merujuk pada Juknis KMN, maka syarat untuk menjadi anggota peminjam adalah :

- a. Memiliki usaha dan pengalaman usaha lebih dari satu tahun
- b. Peminjam merupakan RTM yang memiliki tanggungan yang banyak
- c. Usaha yang dilakukan adalah usaha yang cepat menghasilkan dan mudah dikontrol oleh pihak pengawas dan pengelola dana KMN

Dari hasil wawancara dengan anggota peminjam, mengatakan mereka mendengar dari teman mereka yang ikut rapat sosialisasi dana KMN bahwa ada pinjaman dana untuk masyarakat. Sehingga mereka datang dan mendaftar kemudian langsung menjadi anggota peminjam, dan ketika dikonfirmasi kepada pengurus KMN mereka membenarkannya, karena apabila diikuti Juknis KMN terlalu rumit dan lama jawab mereka. Pokja di Kelurahan Tabing Banda Gadang tidak memberlakukan aturan yang seperti didalam Juknis, sehingga membuat resiko terjadinya kemacetan dalam pengembalian dana KMN itu sangat tinggi.

4.4.1.2. Besar Pinjaman Dan Bunga Pinjaman

Di Kelurahan Tabing Banda Gadang, pinjaman yang dilakukan oleh anggota peminjam dana KMN berkisar antara Rp 500.000 – Rp 6.000.000. dan tidak dikenakan bunga untuk setiap pinjaman. Tetapi dari hasil wawancara dengan anggota peminjam dana KMN mengatakan, setiap anggota peminjam diharuskan melakukan simpanan pinjaman yang besarnya berbeda – beda yaitu berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Ketika dikonfirmasi kepada

pengurus mengatakan, itu dilakukan agar anggota memiliki simpanan yang sewaktu – waktu dapat digunakan untuk kepentingan insidental atau mendadak.

4.4.1.3. Kelompok Awal Dan Kelompok Tunggu

Di Kelurahan Tabing Banda Gadang, berdasarkan hasil dari wawancara dengan responden mengatakan, pada awal peminjaman dilakukan pengurus mengatakan ada namanya kelompok awal dan ada kelompok tunggu tapi setelah peminjaman yang dilakukan oleh beberapa anggota dilunasi. Kelompok awal dan kelompok tunggu menjadi tidak jelas karena mereka yang telah melunasi terlalu lama menunggu dengan alasan banyak diantara peminjam yang tidak melunasi, sehingga mereka harus bersabar sampai dana KMN terkumpul untuk dipinjamkan kembali.

Ketidak jelasan kelompok awal dan kelompok tunggu membuat peminjam curiga dan anggota peminjam yang belum melunasi pinjamannya menjadi tidak mau melunasi. Dari wawancara dengan 30 responden, 17 orang diantaranya mengatakan tidak mau melunasi padahal masih ada sisa pinjamannya. Seperti pada Tabel 15.

Tabel 15. Keadaan Responden

No	Pinjaman	Sisa pinjaman	Keterangan
1	2.000.000	600.000	Tidak mau bayar
2	2.000.000	1.000.000	Tidak mau bayar
3	1.500.000	200.000	Tidak mau bayar
4	5.000.000	1.000.000	Tidak mau bayar
5	5.000.000	1.000.000	Tidak mau bayar
6	2.000.000	250.000	Tidak mau bayar
7	3.000.000	200.000	Tidak mau bayar
8	2.000.000	250.000	Tidak mau bayar
9	3.000.000	700.000	Tidak mau bayar
10	5.000.000	400.000	Tidak mau bayar
11	1.500.000	250.000	Tidak mau bayar
12	2.000.000	600.000	Tidak mau bayar
13	1.500.000	800.000	Tidak mau bayar
14	2.000.000	1.500.000	Tidak mau bayar
15	5.000.000	1.000.000	Tidak mau bayar
16	1.500.000	1.250.000	Tidak mau bayar
17	6.000.000	1.500.000	Tidak mau bayar

4.4.2. Aturan Pengembalian

4.4.2.1. Jangka Waktu Pengembalian

Pokja KMN di kelurahan tabing banda gadang menetapkan aturan untuk jangka waktu pengembalian dana KMN adalah selama 10 bulan, dengan angsuran 10 kali angsuran. Dari hasil wawancara dengan peminjam dana KMN mereka mereka mengatakan jangka waktu 10 bulan adalah jangka waktu yang pas dan tidak memberatkan mereka untuk melunasi pinjamannya. karena dari hasil wawancara dengan penerima kerdit mikro nagari sebaran pendapatan mereka itu berkisar Rp 50.000 perhari sampai dengan Rp 500.000 perhari. Dan apabila pinjaman mereka itu berkisar dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 6.000.000, maka mereka dapat menyisihkan pendapatan mereka yaitu berkisar dari Rp 17.000 sampai dengan 200.000 perharinya. Seperti dalam tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Sebaran Pendapatan Responden

No	Pendapatan perbulan	Saving /hari	sebulan
	1.500.000 – 2.000.000	17.000 – 20.000	500.000 – 600.000
	2.000.000 – 3.000.000	20.000 – 40.000	600.000 – 1.000.000
	> 3.000.000	150.000 – 200.000	4.500.000 – 6.000.000

4.4.2.2. Sanksi Keterlambatan Pengembalian

Tidak ada sanksi yang diterapkan oleh pengurus KMN untuk keterlambatan pengembalian. Ketika diwawancarai pengurus mengatakan, sanksi memang tidak diberlakukan tapi peminjam yang terlambat pengembalian pinjamannya diberikan peringatan lewat surat peringatan. Dan ketika dikonfirmasi kepada responden mereka mengatakan mereka memang mendapatkan surat peringatan tetapi mereka tidak terlalu khawatir karena didalam surat tersebut tidak tertera sanksi.

4.4.2.3. Pengembalian Diantar Atau Dijemput

Di Kelurahan Tabing Banda Gadang pengembalian dana pinjaman KMN diantar oleh anggota peminjam langsung kerumah bendaharawan KMN. Dari hasil wawancara langsung keanggota peminjam mengatakan, bahwa pinjaman diantar langsung kerumah bendahara KMN, setelah itu anggota mengisi kartu pengembalian yang hanya ada pada pengurus saja sedangkan kartu untuk anggota tidak ada dan tidak ada kwitansi pembayaran yang diberikan oleh pengurus.

Ketika dikonfirmasi dengan pengurus mengatakan, pemungutan tidak dilakukan lagi karena pengurus tidak punya waktu, dan apabila melakukan pemungutan selalu mendapat sambutan yang tidak enak dari anggota peminjam, karena merasa pengurus tidak percaya kepada mereka. Dan kartu pengembalian kenapa tidak ada pada anggota tidak bisa dijawab karena itu kebijakan dari bendahara, yang pada waktu itu tidak dapat dikonfirmasi karena pergi keluar kota.

Selain itu anggota tidak pernah melihat laporan perkembangan dana KMN, baik itu berupa nama – nama peminjam yang melunasi atau siapa – siapa saja yang belum melunasi pinjamannya.

Dari hasil wawancara dengan anggota penerima ada beberapa masalah dalam prosedur pengembalian dana kredit mikro nagari yaitu diantaranya :

1. Tidak ada tanda bukti pembayaran/cicilan yang diberikan kepada anggota peminjam
2. Tidak ada bukti pelunasan dana kredit mikro nagari dari tim teknis/pokja
3. Tidak transparansi jumlah uang pengembalian dari anggota peminjam
4. Anggota tidak pernah melihat laporan perkembangan dana kredit mikro nagari

Sehingga anggota peminjam yang telah melunasi pinjamannya dan ingin melakukan pinjaman lagi maka mereka harus menunggu tanpa mengetahui sampai kapan mereka menunggu.

4.4.3. Pengawasan

4.4.3.1. Pelaporan

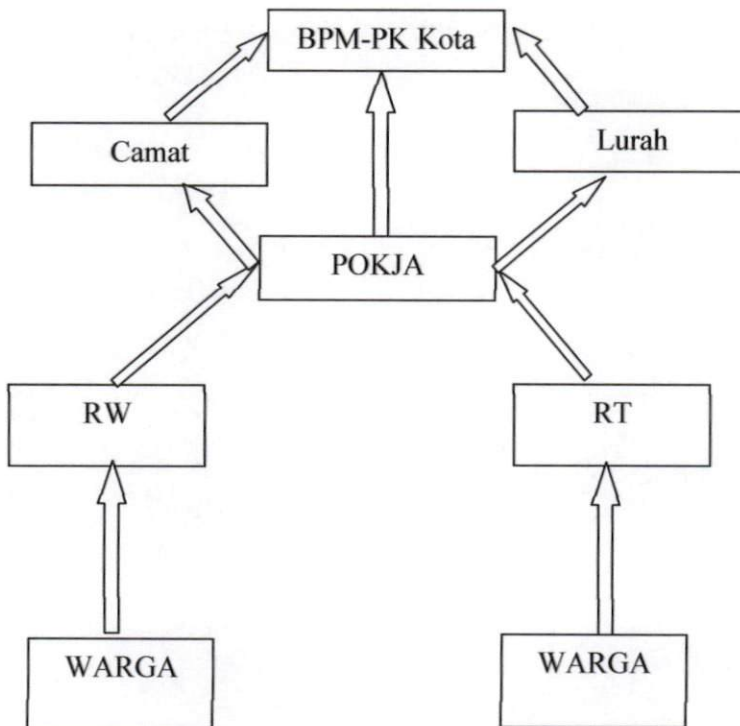
Di Kelurahan Tabing Banda Gadang pelaporan dilakukan oleh Pokja setiap bulannya, yaitu berupa data perkembangan dana KMN Kelurahan Tabing Banda Gadang. Laporan tersebut seharusnya diberikan kepada Lurah dan Camat, tetapi Pokja Tabing Banda Gadang tidak melakukannya, laporan perkembangan dana KMN langsung diberikan kepada BPM-PK Kota Padang. Dari hasil wawancara dengan BPM-PK Kota Padang mengatakan, bahwa pada tahun 2007 – 2009 mereka tidak menerima laporan penuh 12 bulan tiap tahun dari Pokja kelurahan tapi selalu tidak lengkap bulannya, tetapi pada akhir 2009 BPM-PK

Kota Padang memberi teguran langsung kepada Pokja kelurahan, sehingga pada tahun 2010 Pokja tiap kelurahan memberikan laporannya utuh 12 bulan tiap bulan.

Termasuk Kelurahan tabing Banda Gadang, tapi dari laporan yang diterima BPM-PK dari Pokja Kelurahan Tabin Banda Gadang selalu sama isinya dan tidak ada perubahan sedikitpun.

4.4.3.2. Peninjauan Langsung Oleh Fungsi Pengawasan

Yang termasuk dalam fungsi pengawasan adalah BPM-PK Kota Padang dalam hal ini dilaksanakan oleh TKPK Kota kemudian, Camat, Lurah, Ketua RT, Ketua RW. Apabila merujuk pada juknis KMN semua yang termasuk dalam fungsi pengawasan harus melakukan peninjauan langsung mulai dari tingkat RT sampai tingkat kota. Dimana RT dan RW akan meninjau warga RT dan RW mereka, kemudian Lurah dan Camat meninjau Pokja, kemudian BPM-PK Kota Padang meninjau camat, Lurah dan Pokja, seperti terlihat pada gambar dibawah ini



Gambar 4. Peninjauan Yang Dilakukan Oleh Fungsi Pengawasan

Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan anggota penerima pinjaman dana KMN di Kelurahan Tabin Banda Gadang mengatakan, bahwa mereka tidak

pernah didatangi oleh pihak pengelola dana KMN, baik dari pihak BPM-PK Kota Padang, Kelurahan sampai dengan pihak Pokja sendiri untuk menanyakan atau meninjau perkembangan dana KMN yang mereka pinjam. Dan ketika dikonfirmasi kepada masing – masing fungsi pengawasan, mereka mengakui tidak pernah melakukan peninjauan langsung ke anggota peminjam. Apalagi dari pihak RT dan RW mengatakan, bahkan Pokja sendiri tidak ada berkoordinasi dengan mereka sehingga mereka kehilangan fungsi.

4.4.3.3. Evaluasi Dari Peninjauan Yang Dilakukan

Karena di kelurahan tabing banda gadang tidak melakukan peninjauan langsung terhadap anggota peminjam maka secara otomatis tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh masing – masing fungsi pengawas. Dimana sebenarnya evaluasi adalah tahapan yang sangat harus dilakukan agar program KMN dapat berkelanjutan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis kelurahan melalui program KMN di Kelurahan Tabing Banda Gadang masih belum dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti tidak adanya identifikasi anggota penerima dan tidak adanya penilaian kelayakan usaha anggota penerima, dimana ketidaksesuaian tersebut mendorong terjadinya kemacetan dalam pengembalian dana KMN di Tabing Banda Gadang.
2. Faktor – Faktor penyebab kemacetan kredit mikro nagari dikelurahan Tabing Banda Gadang
 - a. Tidak adanya aturan – aturan untuk anggota penerima yang bersifat mengikat yang dapat mendisiplinkan sekaligus membuat nyaman anggota peminjam, seperti tidak adanya syarat untuk jadi anggota, dan tidak adanya kepastian kelompok awal dan kelompok tunggu sehingga anggota peminjam menjadi tidak nyaman dan curiga. Sehingga anggota peminjam menjadi tidak mau melunasi pinjamannya
 - b. Tidak adanya sanksi untuk keterlambatan pengembalian pinjaman. Sehingga dorongan yang memaksa anggota peminjam dana KMN untuk tidak terlambat dalam pengembalian dana kredit
 - c. Tidak adanya keterbukaan pengurus dengan anggota mengenai hal pelaksanaan program yang membuat anggota curiga dan tidak mau melunasi pinjamannya .
 - d. Tidak berjalanya fungsi pengawasan, sehingga tidak ada evaluasi yang dapat dilakukan, yang membuat pengurus tidak dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kemacetan.

5.2. Saran

Untuk keberhasilan berjalannya program pemerintah dan suksesnya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tabing Banda Gadang sebaiknya program-program penanggulangan kemiskinan seperti kredit mikro nagari (KMN) dilakukan atau dijalankan dalam kelompok – kelompok kecil sehingga mudah

dalam proses pengawasan. Apabila proses pengawasan berjalan lancar maka kemungkinan kredit itu macet yang diakibatkan karena peminjamnya tidak mau bayar sangat kecil. karena selalu ada evaluasi program

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlin, C Dan Jiang, N. (2008). Can Mikro- Credit Bring Development/ Journal OfDevelopment Economics, 86(1), 1-21
- Baswir,Revrison d,dkk. 2003.*Pembangunan Tanpa Perasaan*.ELSAM, Jakarta.
- BPM-PK Kota Padang, 2009. Keadaan penerima KMN Kota Padang.
- Daniel, Moehar. 2007.*Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bumi Aksara . Jakarta
- Frihana,Nia,, 2009 ” *Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang*”.skripsi.universitas andalas padang
- Hadisapoetro, 1973. *Biaya dan Pendapatan Pada Usaha Tani*. Departemen Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Jhingan. M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartonegoro, Sentoso.1994. *Manajemen Organisasi*. Widya Press. Jakarta
- Mayrowani, Henny. 2008. *Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung (Kasus Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan)*. Analisis Kebijakan Pertanian 6 (3): 256-271
- Moleong,Lexy.J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mubyarto. 1987. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta. LP3ES
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan ke 5. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nurmanaf,A.Rozany.*Partisipasi Masyarakat Petani Terhadap Program Penganggulungan Kemiskinan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*,Volume 1 No. 2. Juni 2003.Hal 110-122. 2009.
- Petunjuk Teknis pengelolaan Kredit Mikro Nagari,2008)
- Soekartawi. 1984. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil* terjemahan dari Jhon L. D. Brian, H. UI-Press. Jakarta.
- Soeharjo, A dan Patong. 1973. *Sendi-sendi Pokok Ilmu Usahatani*. Departemen sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Sukmadi dan Sudrajat, 1994. *Mengajukan dan mengelola kredit usaha tani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Suyatno, Thomas *et al.* 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 126 hal.
- Sumodiningrat, G. 2003. *Optimalisasi Unit Pengelola Keuangan dalam Perguliran Dana sebagai Modal Usaha*. [http: // suniscome](http://suniscome)

- [.50webs.com / data / download / 006%20Optimalisasi%20UPKD.pdf](http://50webs.com/data/download/006%20Optimalisasi%20UPKD.pdf).
[18/02/2010]. *Kecil* terjemahan dari Jhon L. D. Brian, H. UI-Press.
Jakarta.
- Sugiarto, dkk. 2003. *Teknik Sampling*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pangan Media Komunikasi dan Informasi*. Edisi No. 41/XII/Juli/2003.
- Zatrika dewi, Weni. *Studi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Kredit Mikro Nagari*
- Wijono, Wiloejo. W.. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*.
<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cwiloejo-1.pdf>
[Kamis, 2 Juli 2009. 11.30 WIB].
- World Bank. Indonesia: *Gagasan untuk Masa Depan*. 2005
- Zatrika dewi, Weni. 2009. *Studi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Kredit Mikro Nagari: Skripsi Universitas Andalas Padang*

NO	Kecamatan/kelurahan	Jmlh pddk	PENDUDUK MISKIN			BANTUAN APBD	
			RTM	JIWA	%	PROVINSI	KOTA PADANG
1	Bungus teluk kabung						
	1.bungus barat	6.564	406	1.973	29.96	Rp 300.000.000	
	2. bungus selatan	3.713	187	824	22.67		Rp 300.000.000
	3. teluk kabung tengah	2.617	195	1.082	41.34		Rp 300.000.000
2	Lubuk kilangan						
	1.Batu gadang	5.436	336	1.333	24.52	Rp 300.000.000	
	2.koto lalang	5.937	311	1.586	26.71	Rp 300.000.000	
	3. Indaruang	9.982	530	2.356	23.60		Rp 300.000.000
	4. Bandar buat	10.454	471	2.307	22.06		Rp 300.000.000
3	Nanggalo						
	1.Tabing banda gadang	3.210	85	479	14.92	Rp 300.000.000	
	2. Surau Gadang	21.506	423	2.066	9.60		Rp 300.000.000
	3. kurao pagang	10.624	489	2.583	24.31		Rp 300.000.000
4	Kuranji						
	1. ampan	50822	345	1.739	29.86	Rp 300.000.000	
	2. kuranji	25.655	1.070	5.495	21.41	RP 300.000.000	
	3. gunung sariak	13.986	931	13.986	31.08	Rp 300.000.000	
	4. kalumbuak	7.825	475	2.370	30.28		Rp 300.000.000
	5. sungai sapih	8.834	480	2.489	28.14		Rp 300.000.000
5	PAUH						
	1. 1. Pisang	6.385	196	1.028	16.10	Rp 300.000.000	
	2. limau manias selatan	7.961	303	1.393	17.49		Rp 300.000.000
	3.limau manis	4.490	277	1.354	30.15		Rp 300.000.000
6	Koto tengah						
	1.Air pacah	5.939	457	2.264	38.15	Rp 300.000.0000	
	2.parupuak tabing	21.877	747	3.663	16.74	Rp 300.000.0000	
	3.batipuah panjang	10.984	612	3.331	30.42	Rp 300.000.0000	
	4.balai gadang	10.488	624	3.057	29.14	Rp 300.000.0000	
	5.pasia nan tigo	11.510	594	3.268	28.39		Rp 300.000.0000
	6.lubuak minturun	6.800	480	2.330	34.26		Rp 300.000.0000
	Jumlah					Rp 3.600.000.000	

Lampiran 2

**DATA KEADAAN PENERIMA KREDIT MIKRO NAGARI
KECAMATAN NANGGALO
KOTA PADANG**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENERIMA (ORANG)	MENUNGGAK (ORANG)	LANCAR (ORANG)	% MACET
1	KURAO PAGANG	647	152	495	23,4
2	TABING BANDA GADANG	159	140	19	88,0
3	SURAU GADANG	426	128	298	30,0
4	GURUN LAWEH	124	34	90	27,4
5	KAMPUNG OLO	267	25	242	9,3
6	KAMPUNG LAPAI	476	114	362	23,9

Sumber: BPM-PK Kota Padang, 2007.(data di olah)

Lampiran 3. Daftar hadir rapat pembentukan POKJA Kelurahan.

DAFTAR HADIR: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA/PENGELOLA
DANA KREDIT MIKRO NAGARI/KELURAHAN TAHUN 2007
KELURAHAN TABING BANDA GADANG
TANGGAL 9 NOVEMBER 2007

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Asra	Wk. Tabaga	h2
2	H. Ridwan Sj	TOMAS	Wag
3	ALIMIAH	K. PPU. TAG	
4	JAMARIS. 30g	KET. RT. 02/II	
5	Sudhiman. M	Ks. PM.	
6	Anis Azis	RT 02/II	
7	Syafrudi	Selur. b. th	
8	Reinier	LPM	
9	Hyofina. J.	Kep. PEM.	
10	Jhonny Gurra	Jabr. K. Taruna	
11	SYAFRIC	RT 01/RW II	
12	MUSLIERWATI	Kesab	
13	Lena Zakarti, S.Si	KARANG TARUNA	
14	ALISNA	Staf	
15	SYAFRI, SP	Ketua RW. II	
16	Ali Anura	Ketua RT 02/II	
17	Epfiar	PICIL.	
18	Indira	Penda.	
19	Zulfahmi	K. Taruna	
20	Lena Zakarti	- -	
21			
22			

EMERINTAH
Padang, 9 November 2007
Lurah Tabin Banda Gadang
KEC. NANGGALO
KEL. TABING BANDA GADANG

: 32 / TBG-PM/ 2008

Padang, 16 Februari 2008

: 1 (Satu) rangkap

: Mohon Pencairan Dana Kredit Mikro

Kepada Yth:

Bapak Wali Kota Padang

C/q. Bapak Kepala BPM-KB Kota Padang

Di

PADANG

Dengan hormat,

Berdasarkan pengajuan persyaratan peminjaman dana Kredit Mikro Nagari Kelurahan Tabinng Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang tahun 2007 oleh Ketua POKJA, maka bersama ini kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui pencairan Dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sudah terbentuk kelompok- kelompok usaha Ekonomi Kecil. Untuk pencairan Dana tersebut disampaikan atas nama POKJA yang dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya operasional Pokja Pengelola Kredit Mikro	Rp. 7.600.000.-
2	Dana peminjaman Kredit Mikro	Rp. 150.000.000.-
	Jumlah	Rp. 157.600.000.-

(Seratu lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Bersama ini kami sampaikan rincian dana sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, mohon kiranya pertimbangan dan persetujuan Bapak selanjutnya



Nip. 010141890

Lampiran 5. Berita Acara Musyawarah Kelurahan Tabing Banda Gadang

KELompok KERJA KELURAHAN PENGELOLA DANA KREDIT
MIKRO KEL. TABING BANDA CADANG

B E R I T A A C A R A
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KELOMPOK

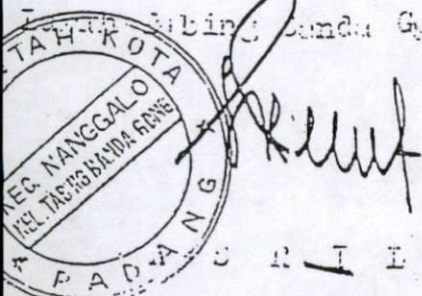
No. : 05 / POKJA-EDG/2008

Pada hari ini tanggal . . 15 . . Februari . . 2008 tahun 2008 -
mulai pukul bertempat di rumah saya Ke -
ua POKJA telah melakukan Musyawarah Pembentukan Kelompok Ekonomi Usa -
a Keluarga Ekonomi Kecil atau Kelompok penerima dana Pinjaman Kredit -
ikro.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dapat digunakan menurut ke -
perluannya.

Mengetahui :

Ketua Kelurahan Tabing Banda Gadang



NIP:01014000.

Gadang, 15 Februari 2008

Ketua POKJA

H. RIDWAN JAMSUDDIN, SH, MEA

Lampiran 6. Surat perjanjian pemberian bantuan KMN

Surat Perjanjian Pokja Dengan Kelompok Tentang Penyaluran Dan Pengembangan Kredit

Nomor: 06 / PEM-TBG / 2008

Pada hari ini...Jawa tanggal.....bulan tahun dua ribu delapan bertempat di...Kecamatan...Kabupaten...Gadung.....kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. RIDWAN SYAMSUDDIN, SH.MBA
- Jabatan : KETUA POKJA KEMURAHAN
- Alamat : KOLP. TARUKO RT 03 / RW 03

Dalam hal ini bertindak atas nama Pokja disebut Pihak Pertama

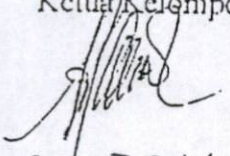
2. Nama : SYAFRIL
- Jabatan : KETUA KELOMPOK
- Alamat : KP. LERENG RT01/II.

Menjalankan Tugas & Kewajiban...disebut Pihak Kedua

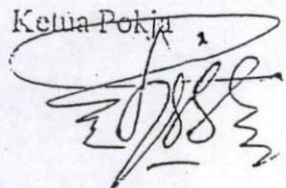
bertanggung jawab melaksanakan kredit Mikro sepenuhnya.

Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Ketua Kelompok


 (.....SYAFRIL.....)

Ketua Pokja


 (H. Ridwan Syamsudin, SH, M.BA)

Lampiran 7. Surat keputusan Lurah Tabing Banda Gadang

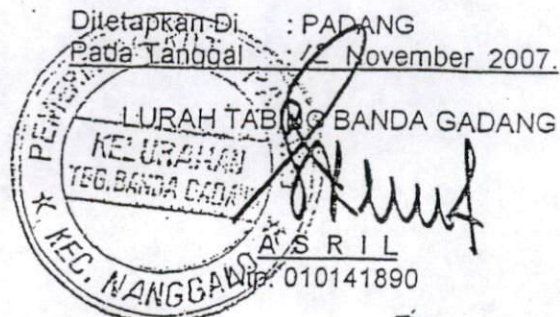
SURAT KEPUTUSAN
LURAH TABING BANDA GADANG KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG
NOMOR : 172 /SK/TBG-PM/XI-2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KREDIT MIKRO
KELURAHAN TABING BANDA GADANG KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Program Bantuan Kredit Mikro di Kelurahan Tabing Banda Gadang pada Tahun 2007, agar bantuan tersebut tepat guna dan sasaran, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan.
 b. Bahwa berdasarkan hasil rapat/Musyawarah bersama tanggal November 2007 yang dihadiri oleh Pengurus LPM, Karang Taruna, Ketua RW dan RT, Pengurus TP. PKK dan Tokoh masyarakat, sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Tabing Banda Gadang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Perda Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2004 tentang Kelurahan.
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
 6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.
 7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 134/III/PKSDM-PK/Bappeda/2007 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kredit Mikro Kelurahan/Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kredit Mikro Kelurahan Tabing Banda Gadang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
 Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut diatas dapat melaksanakan tugas untuk membentuk kelompok penerima bantuan Kredit Mikro dan didalam pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab kepada Lurah Tabing Banda Gadang.
 Ketiga : Surat Keputusan ini mulai semenjak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

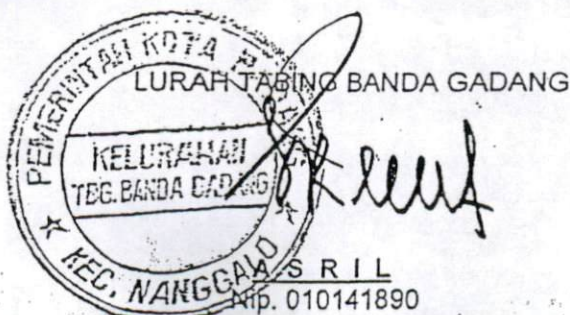
1. Bapak Camat Nanggalo
2. Bapak Ketua LPM Kelurahan Surau Gadang
3. Bapak Ketua RW yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN NANGGALO
KELURAHAN TABING BANDA GADANG

Alamat : Jl. Tabing Banda Gadang Padang

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo
 Nomor : 172 /SK/TBG-PM/XI-2007
 Tanggal : 12 November 2007.
 Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan
 Kredit Mikro Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan
 Nanggalo

NO	N A M A	PEKERJAAN	JABATAN DALAM POKJA
1	Asril	Lurah	Penanggung Jawab
2	1. Ir. Reinier Dt. In. Bth 2. Drs. Sulaiman Kasim 3. Asmadi, SH 4. Amizar	Ketua LPM	Penasehat
3	H.Ridwan Syamsudin,SH,MBA	Seksi Ekonomi LPM	Ketua
4	Sudirman	Kasi Pemberdayaan	Fungsi Pelaporan
5	Buk Eni	Pengurus PKK Kelurahan	Fungsi Keuangan
6	Jhoni Putra, ST	Pengurus Karang Taruna	Fungsi Perencanaan
7	Syamsir Syafri, SP Drs, Nasrun DJ Wahyu Irdiansyah Ali Amran Mukni Said, BA Anis Aziz Drs. Akrinier Ardi Syafri Jamaris, S,Ag Hendri Zunan Nasrul Syafri Yefri, S.Sos	Ketua RW/RT se- Kel. Tabing Banda Gadang	Fungsi Pengawasan



Lampiran 8. Laporan Pelaksanaan KMN kelurahan tabing banda gadang desember 2010

No	Kelompok Peminjam	Peminjam (RT/RW)	Usaha	Alokasi Dana (Rp)	Pinjaman (Minggu/Bln)	Bulan Memulai Meminjam	Besar Cicilan / Bulan (Rp)	Jumlah Pengembalian Bln Ini (Rp)	Cicilan Ke	Jumlah Pengembalian 5/D Bln Ini	Sisa Pinjaman (Rp)	Keterangan		Besar Tunggakan
												Lancar	Tidak Lancar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KELOMPOK 1													
1	BAKIR	RT 01/RW I	Bengkel	2,000,000	10 Bln	MEI	200,000	-	-	-	-	-	-	-
2	SYAMSIR	RT 01/RW I	Kedai	2,000,000	10 Bln	MEI	200,000	-	-	-	600,000	-	-	-
3	SIFIA/PITIT	RT 01/RW I	Buah-buahan	1,000,000	10 Bln	MEI	100,000	-	-	-	800,000	-	-	-
4	DASRIL	RT 01/RW I	Sayuran	1,000,000	10 Bln	MEI	100,000	-	-	-	300,000	-	-	-
5	ALI AMRAN/NOVA	RT 01/RW I	Sayuran	500,000	10 Bln	MEI	50,000	-	-	-	300,000	-	-	-
	KELOMPOK III										250,000			
6	ASMI	RT 02/RW I	Beras	2,000,000	10 Bln	MEI	200,000	-	-	-	500,000	-	-	-
7	YANTI OKTAVIA	RT 02/RW I	Kedai	1,000,000	10 Bln	MEI	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
8	MUSNETI	RT 02/RW I	Kedai	1,000,000	10 Bln	MEI	100,000	-	-	-	200,000	-	-	-
	KELOMPOK IV													
9	EMRIZON/NELWATI	RT 02/RW I	Jual Pot	1,000,000	10 Bln	MEI	100,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
	KELOMPOK V													
10	TARMIZI	RT 03/RW I	Kedai	1,000,000	10 Bln	MEI	100,000	-	-	-	-	-	-	-
11	ASRIL	RT 03/RW I	Jual Tape	2,500,000	10 Bln	MEI	250,000	-	-	-	200,000	-	-	-
12	ANDI/OTON	RT 03/RW I	Kedai	1,000,000	10 Bln	MEI	100,000	-	-	-	250,000	-	-	-
13	ASNEMI	RT 03/RW I	Jual Sayur	1,000,000	10 Bln	MEI	100,000	-	-	-	700,000	-	-	-
	KELOMPOK VII										400,000			
	KELOMPOK XII													
14	JAMARUDIN	RT 02/RW III	P & D	2,000,000	10 Bln	MEI	200,000	-	-	-	800,000	-	-	-
	Jumlah			19,000,000			1,900,000	-	-	-	6,400,000			

NO	NAMA KELOMPOK PEMINJAM	ALAMAT PEMINJAM (RT/RW)	JENIS USAHA	BESAR PINJAMAN ALOKASI DANA (Rp)	LAMA PINJAMAN (MINGGU/BLN)	BULAN MEMULAI MEMINJAM	BESAR CICILAN / BULAN (Rp)	JUMLAH PENGEMBALIAN BLN INI (Rp)	CICILAN KE	JUMLAH PENGEMBALIAN 5/D BLN INI	SISA PINJAMAN (Rp)	KETERANGAN		BESAR TUNGGAKAN
												LANCAR	TIDAK LANCAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	KELOMPOK XV													
19	SUMARNI	RT 02/RW I	Bengkel	1,000,000	10 BLN	AGUSTUS	100,000	-			400,000			
20	NASRIL/ET	RT 01/RW I	P & D	2,500,000	10 BLN	SEPTEMBER	250,000	-						
20	SAMUAL	RT 01/RW II	Jual Rokok	500,000	10 BLN	SEPTEMBER	50,000	-			450,000			
	KELOMPOK XVI													
	KELOMPOK XVII													
21	SYAFRI	RT 02/RW I	Jual Ikan	2,000,000	10 BLN	NOVEMBER	200,000	-			1,600,000			
22	SARBANI	RT 01/RW II	Jual Buah-buahan	2,500,000	10 BLN	NOVEMBER	250,000	1,250,000						
23	SABAIS	RT 02/RW I	Kedai	2,500,000	10 BLN	NOVEMBER	250,000	1,250,000						
24	ANIDAR	RT 01/RW II	Jahit Baju	2,500,000	10 BLN	NOVEMBER	250,000	1,250,000						
25	ARNI	RT 02/RW I	Kedai	2,000,000	10 BLN	NOVEMBER	200,000	1,000,000						
26	STUKIRYADI	RT 05/RW III	Kedai	5,000,000	10 BLN	OKTOBER	500,000	-			5,000,000			
27	OYONG	RT 04/RW III	Fotocopi	5,000,000	10 BLN	OKTOBER	500,000	-			5,000,000			
	KELOMPOK XVIII													
28	ROSNA	RT 02/RW II	Kedai	1,500,000	10 BLN	DESEMBER	150,000	-			900,000			
29	ERWIN	RT 01/RW I	P & D	2,000,000	10 BLN	DESEMBER	200,000	-			1,600,000			
30	DESIMAL	RT 04/RW III	Bangunan	5,000,000	10 BLN	DESEMBER	500,000	*			3,000,000			
31	STAHRIUL YANTI	RT 03/RW III	Kue	1,000,000	10 BLN	DESEMBER	100,000	-			250,000			
32	EMITA MUJAL	RT 01/RW II	Buah-buahan	2,000,000	10 BLN	DESEMBER	200,000	-			1,100,000			
	KELOMPOK XIX													
33	LENNY	RT 03/RW II	Kue	1,500,000	10 BLN	DESEMBER	150,000	400,000						
34	AIDA	RT 02/RW I	P & D	1,000,000	10 BLN	DESEMBER	100,000	-			1,050,000			
35	ASRIYENNI	RT 02/RW II	Kedai	1,500,000	10 BLN	DESEMBER	150,000	-			300,000			
	Jumlah			41,000,000			4,100,000	5,150,000			20,650,000			

Lampiran 8. Laporan Pelaksanaan KMN kelurahan tabing banda gadang Desember 2010

NO	NAMA KELOMPOK PEMINJAM	ALAMAT (RT/RW)	JENIS USAHA	BESAR PINJAMAN ALOKASI DANA (Rp)	LAMA PINJAMAN (MINGGU/BLN)	BULAN MEMULAI MEMINJAM	/ BULAN (Rp)	BUN INI (Rp)	CICILAN KE	JUMLAH PENGEMBALIAN BUN INI (Rp)	JUMLAH PENGEMBALIAN 5/D BUN INI	SISA PINJAMAN (Rp)	KETERANGAN		TUNGGAKAN BESAR
													LANCAR	TIDAK LANCAR	
1	KELOMPOK XX	RT 03/RW II	P & D	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	SUTIMINE/ERI	RT 03/RW II	P & D	5,000,000	10 BLN	DESEMBER	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
37	MUSLIM/ERI	RT 03/RW II	P & D	5,000,000	10 BLN	DESEMBER	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
38	KELOMPOK XXI	RT 01/RW I	Kedai	2,500,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	MULLU	RT 01/RW I	Kedai	1,000,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	AMRIZON	RT 01/RW I	Kedai	1,000,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	YULIANA	RT 01/RW I	Beras	1,000,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	ARMIZUL	RT 02/RW I	Kedai	1,000,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	KELOMPOK XXII	RT 02/RW III	P & D	2,000,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	KASHMAN	RT 03/RW III	P & D	2,000,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	SAFRIADI	RT 02/RW III	P & D	2,500,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	ZULDAHIL	RT 03/RW III	Gunting Rambut	2,500,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	ENDRIZAL	RT 03/RW III	Counter Hp	2,500,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	JUNAIDI/ZAMMAR	RT 02/RW II	P & D	2,000,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	KELOMPOK XXIII	RT 04/RW III	Kue	1,500,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	NELZAWATI YUNI	RT 02/RW II	Kue	2,000,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	ENNITA YOSEVA	RT 02/RW I	Kedai Nasi	1,500,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	YUSNELLI	RT 02/RW I	P & D	1,500,000	10 BLN	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah			36,000,000			2,000,000					15,500,000			
1	KELOMPOK XXIV	RT 02/RW II	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
53	ASRI/UAANG	RT 02/RW II	Sayuran	1,000,000	10 BLN	DESEMBER	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
54	DESMON	RT 02/RW II	Sayuran	1,000,000	10 BLN	DESEMBER	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
55	DESMON	RT 03/RW II	Jahit Baju	2,500,000	10 BLN	DESEMBER	250,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	
56	EDWAR	RT 02/RW II	Rempah	2,500,000	10 BLN	DESEMBER	250,000	-	-	-	-	-	-	-	
57	DESNITA	RT 03/RW II	Jual Pakalan	5,000,000	10 BLN	DESEMBER	500,000	-	-	-	-	-	-	-	
58	RENI	RT 02/RW II	Bentol	1,500,000	10 BLN	JANUARI	150,000	-	-	-	-	-	-	-	
59	HERMANUS	RT 01/RW II	Kedai	1,000,000	10 BLN	JANUARI	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
60	KELOMPOK XXVI	RT 02/RW I	Kedai	1,000,000	10 BLN	JANUARI	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
61	EVY YULIANTI	RT 02/RW I	Kedai	1,000,000	10 BLN	JANUARI	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
62	SAYARNIS	RT 01/RW I	Kedai	1,000,000	10 BLN	JANUARI	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
63	KHARUL ANWAR	RT 01/RW I	Ternak Itan	3,000,000	10 BLN	JANUARI	300,000	-	-	-	-	-	-	-	
64	ELEN	RT 01/RW I	Sayuran	1,000,000	10 BLN	JANUARI	100,000	200,000	-	-	-	-	-	-	
65	JUNAIDI	RT 02/RW I	Kedai	1,000,000	10 BLN	JANUARI	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
66	STAMSU/OTYONG	RT 02/RW I	Jual Ayam	2,000,000	10 BLN	JANUARI	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
67	JUSNAIDA	RT 02/RW I	Kedai	3,000,000	10 BLN	JANUARI	300,000	-	-	-	-	-	-	-	
68	DESMANWATI	RT 02/RW I	Kedai	3,000,000	10 BLN	JANUARI	300,000	-	-	-	-	-	-	-	
69	RIDWAN FEDRI	RT 02/RW II	Catering	2,000,000	10 BLN	JANUARI	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
70	MURCHARIL	RT 04/RW III	Susu Kedelai	5,000,000	10 BLN	JANUARI	500,000	200,000	-	-	-	-	-	-	
71	KELOMPOK XXVII	RT 02/RW I	Kedai	1,000,000	10 BLN	FEBRUARI	100,000	-	-	-	-	-	-	-	
72	SUKRI	RT 02/RW I	Beras	4,000,000	10 BLN	FEBRUARI	400,000	-	-	-	-	-	-	-	
73	FIRMANSAH	RT 01/RW II	P & D	3,000,000	10 BLN	FEBRUARI	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	
74	BENNY M ZEN	RT 02/RW II	Roti	2,000,000	10 BLN	FEBRUARI	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah			46,500,000			4,650,000	2,700,000				21,630,000			

Lampiran 8. Laporan Pelaksanaan KMN kelurahan tabing banda gadang desember 2010

NO	NAMA KELOMPOK PEMINJAM	ALAMAT PEMINJAM (RT/RW)	JENIS USAHA	BESAR PINJAMAN ALOKASI DANA (Rp)	LAMA PINJAMAN (MINGGU/BLN)	BULAN MEMULAI MEMINJAM	BESAR CICILAN / BULAN (Rp)	JUMLAH PENGEMBALAN BLN INI (Rp)	CICILAN KE	JUMLAH PENGEMBALAN 5/D BLN INI	SISA PINJAMAN (Rp)	KETERANGAN		BESAR TUNGGAKAN
												LANCAR	TIDAK LANCAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	KELOMPOK XXVIII NARSUL	RT 01/RW II	Kedai	1,000,000	10 BLN	FEBRUARI	100,000				700,000			
75	ALYUULU CASMITA	RT 01/RW II	Kedai	1,000,000	10 BLN	FEBRUARI	100,000				300,000			
76	ABDUL MAJID	RT 01/RW II	Kedai	1,500,000	10 BLN	FEBRUARI	150,000	150,000						
77	P. ERI	RT 03/RW II	Kedai	2,500,000	10 BLN	FEBRUARI	250,000	1,500,000						
78	LIS	RT 01/RW II	Jual Baju	5,000,000	10 BLN	FEBRUARI	500,000				2,000,000			
79	HENI	RT 01/RW II	Kue	3,000,000	10 BLN	FEBRUARI	300,000	1,850,000						
80	YUSNITA	RT 03/RW II	Cat Oli	4,000,000	10 BLN	FEBRUARI	400,000				2,950,000			
81	KELOMPOK XXIX NIDAWATI	RT 02/RW II	Bunga	2,000,000	10 BLN	FEBRUARI	200,000				600,000			
82	BUSTAMI	RT 02/RW II	Sayur-sayuran	2,000,000	10 BLN	FEBRUARI	200,000				1,600,000			
83	MURTENIS	RT 02/RW II	Sayur-sayuran	1,500,000	10 BLN	FEBRUARI	150,000	150,000			150,000			
84	CAHYARINI	RT 02/RW II	Tape	2,500,000	10 BLN	FEBRUARI	250,000	250,000			250,000			
85	ANDI	RT 03/RW II	Sayur-sayuran	1,000,000	10 BLN	FEBRUARI	100,000	100,000						
	Jumlah			27,000,000			2,700,000	4,000,000			8,550,000			

NO	NAMA KELOMPOK PEMINJAM	ALAMAT PEMINJAM (RT/RW)	JENIS USAHA	BESAR PINJAMAN ALOKASI DANA (Rp)	LAMA PINJAMAN (MINGGU/BLN)	BULAN MEMULAI MEMINJAM	BESAR CICILAN / BULAN (Rp)	JUMLAH PENGEMBALAN BLN INI (Rp)	CICILAN KE	JUMLAH PENGEMBALAN 5/D BLN INI	SISA PINJAMAN (Rp)	KETERANGAN		BESAR TUNGGAKAN
												LANCAR	TIDAK LANCAR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	HERMAN AMINI	RT 03/RW III	Emergency	1,000,000	10 BLN	MARET	100,000				500,000			
87	MURHASMI/EMI	RT 02/RW I	Kedai	2,000,000	10 BLN	MARET	200,000	800,000						
88	RAMLI	RT 02/RW I	Ternak Ayam	2,000,000	10 BLN	MARET	200,000				1,000,000			
89	BAHMAYENI	RT 01/RW I	Buah-buahan	500,000	10 BLN	MARET	50,000				350,000			
90	DASNI	RT 01/RW I	Kebun Bunga	1,000,000	10 BLN	MARET	100,000				900,000			
91	BASYIR/HENGKI	RT 02/RW I	Itan	1,000,000	10 BLN	MARET	100,000				300,000			
92	FAJRI	RT 03/RW II	Kue	1,100,000	10 BLN	MARET	100,000	600,000						
93	AKE	RT 03/RW II	Ternak Ayam	1,000,000	10 BLN	MARET	100,000	100,000						
94	AZIZ DAHLAN	RT 01/RW I	P & D	2,500,000	10 BLN	MARET	250,000	250,000						
95	MARHAMDANI	RT 02/RW II	Bengkel	2,000,000	10 BLN	MARET	200,000				2,000,000			
	KELOMPOK XXXI													
96	HASAN BASRI	RT 02/RW I	Bedak Beras	1,500,000	10 BLN	APRIL	150,000	150,000						
97	STAMSIAR	RT 02/RW I	Bedak Beras	2,000,000	10 BLN	APRIL	200,000				1,400,000			
98	SAPRIADI	RT 02/RW III	Susu Kedelai	1,000,000	10 BLN	APRIL	100,000				900,000			
99	ERLINA MUSLIM	RT 02/RW II	Kedai	1,500,000	10 BLN	APRIL	150,000	150,000			150,000			
100	BUJANG LIZA	RT 02/RW II	Roti	2,500,000	10 BLN	APRIL	250,000				2,500,000			
101	RIDA/ICON	RT 01/RW II	Kedai	1,000,000	10 BLN	APRIL	100,000	100,000			100,000			
102	SYAFRIZAL/YUNIATI	RT 01/RW II	Bengkel	1,500,000	10 BLN	APRIL	150,000	150,000			150,000			
103	ENDAH	RT 03/RW II	Konveksi	5,000,000	10 BLN	APRIL	500,000	500,000			3,000,000			
	KELOMPOK XXXII													
104	MURHAYATI	RT 03/RW III	Kedai	5,000,000	10 BLN	MEI	500,000				5,000,000			
105	FATMINI	RT 03/RW III	Kue	5,000,000	10 BLN	MEI	500,000				5,000,000			
106	IKI	RT 03/RW III	Jahit Bordir	5,000,000	10 BLN	MEI	500,000				5,000,000			
107	ALANG SYAHBUANA	RT 03/RW III	Ayam Petang	5,000,000	10 BLN	MEI	500,000				5,000,000			
	Jumlah			50,100,000			5,000,000	2,800,000			33,250,000			

Lampiran 8. Laporan Pelaksanaan KMN kelurahan tabing banda gadang desember 2010

NO	NAMA KELOMPOK PENJUAL	ALAMAT PEMINJAM (RT/RW)	JENIS USAHA	BESAR PHINAMAN ALOKASI DANA (Rp)	LAMA PHINAMAN (MINGGU/BLN)	BULAN MEMULAI MEMINJAM	BESAR CICILAN / BULAN (Rp)	JUMLAH PENGEMBALAN BLN INI (Rp)	CICILAN KE	JUMLAH PENGEMBALAN S/D BLN INI	SISA PHINAMAN (Rp)	KETERANGAN			BESAR TUNGGAKAN
												LANCAR	TIDAK LANCAR		
108	KELOMPOK XXXIII HASAN BASRI	RT 02/RW I	Jual Item	1.500.000	10 BLN	JUNI	150.000	-	-	-	-	-	-	-	15
109	STAFRIDA	RT 02/RW I	Jual Jengkol	1.000.000	10 BLN	JUNI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
110	STAMISUL ANWAR	RT 03/RW I	P & D	3.000.000	10 BLN	JUNI	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	15
111	MULYADI MUJIS	RT 02/RW I	Kue	1.000.000	10 BLN	JUNI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
112	RUSTIAN	RT 05/RW I	Jual Ayam	1.000.000	10 BLN	JUNI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
113	STAFRIL DAVID	RT 05/RW I	Jual Pinang	1.000.000	10 BLN	JUNI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
114	STAMISU FIRMANITO	RT 05/RW I	Roti	500.000	10 BLN	JUNI	50.000	-	-	-	-	-	-	-	15
115	NASRIL	RT 05/RW I	Jual Item	1.000.000	10 BLN	JUNI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
116	MIRAWATI	RT 02/RW III	Kue	1.500.000	10 BLN	JUNI	150.000	-	-	-	-	-	-	-	15
117	ROZANA	RT 02/RW III	Gorden	2.000.000	10 BLN	JUNI	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
118	ARI KP	RT 03/RW II	Counter Hip	5.000.000	10 BLN	JUNI	500.000	-	-	-	-	-	-	-	15
119	YENNI	RT 03/RW II	Kedai	1.000.000	10 BLN	JUNI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
120	ARMAN	RT 03/RW II	Ayam Potong	1.000.000	10 BLN	JUNI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
121	AFRIZUL	RT 02/RW II	Kedai	2.000.000	10 BLN	JUNI	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
122	NURMAINI	RT 02/RW II	Tape	2.000.000	10 BLN	JUNI	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
123	NURAINI TONOK	RT 02/RW II	Belu	3.000.000	10 BLN	JUNI	300.000	-	-	-	-	-	-	-	15
124	KELOMPOK XXXIV														
124	MAINI	RT 02/RW II	Jual Sate	1.000.000	10 BLN	JULI	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	15
125	NOFRIGO	RT 02/RW II	Bedak Beras	2.000.000	10 BLN	JULI	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
126	FAUZI NASUTION	RT 02/RW II	Kedai	1.500.000	10 BLN	JULI	150.000	-	-	-	-	-	-	-	15
127	TULIANI/NURITA	RT 02/RW II	Seyuran	1.000.000	10 BLN	JULI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
128	MAWARINI	RT 02/RW II	Seyuran	1.000.000	10 BLN	JULI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
129	PANTEM	RT 05/RW I	Jamu	2.000.000	10 BLN	JULI	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
130	NOVRIADI	RT 02/RW II	Kedai	1.500.000	10 BLN	JULI	150.000	-	-	-	-	-	-	-	15
131	FAUZAH/OSERIZAL	RT 03/RW IV	Jual Baju	2.000.000	10 BLN	JULI	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
132	SRI MULYATI	RT 02/RW I	Kue	500.000	10 BLN	JULI	50.000	-	-	-	-	-	-	-	15
133	REFLUS/JUSNAIDA	RT 02/RW I	Kedai	1.000.000	10 BLN	JULI	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
134	NITA	RT 03/RW II	Jual Baju	5.000.000	10 BLN	JULI	500.000	-	-	-	-	-	-	-	15
135	ISGANDAR	RT 02/RW II	Cabe	1.500.000	10 BLN	JULI	150.000	-	-	-	-	-	-	-	15
136	ARBAINI	RT 02/RW II	Catering	2.000.000	10 BLN	JULI	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
	Jumlah			49.900.000			4.800.000	10.550.000							15
137	KELOMPOK XXXV														
137	SALMIATI	RT 03/RW II	Kedai	2.000.000	10 BLN	AGUSTUS	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
138	BANJAR	RT 02/RW II	Bedak beras	700.000	10 BLN	AGUSTUS	70.000	-	-	-	-	-	-	-	15
139	YATIMUS/RIZA	RT 02/RW I	Menjahit	1.500.000	10 BLN	AGUSTUS	150.000	-	-	-	-	-	-	-	15
140	STAFRIL	RT 02/RW II	Kedai	2.000.000	10 BLN	AGUSTUS	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
141	JEFRIZAL	RT 02/RW I	Rempah	2.000.000	10 BLN	AGUSTUS	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
142	HAIDIRATI	RT 05/RW I	Buah-buahan	500.000	10 BLN	AGUSTUS	50.000	-	-	-	-	-	-	-	15
143	KELOMPOK XXXVI														
143	AZWAR	RT 03/RW IV	Jual Pakan	1.700.000	10 BLN	SEPTEMBER	170.000	-	-	-	-	-	-	-	15
144	AGUSTINA	RT 02/RW II	Jual Pakan	1.000.000	10 BLN	SEPTEMBER	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
145	EVIE	RT 04/RW III	Jual Pakan	2.000.000	10 BLN	SEPTEMBER	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
146	UNDURI/EDRITA	RT 02/RW II	Bedak beras	1.000.000	10 BLN	SEPTEMBER	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
147	ARJUNI	RT 02/RW II	Kedai	1.000.000	10 BLN	SEPTEMBER	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
148	YUSNA/YET	RT 02/RW III	Seyuran	2.000.000	10 BLN	SEPTEMBER	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
149	DIJALMAID/MED	RT 03/RW II	Kedai	3.000.000	10 BLN	SEPTEMBER	300.000	-	-	-	-	-	-	-	15
150	KELOMPOK XXXVII														
150	NASRUL/YET	RT 03/RW IV	Jual Pakan	4.000.000	10 BLN	OKTOBER	400.000	-	-	-	-	-	-	-	15
151	MARIL	RT 02/RW IV	Kedai	1.000.000	10 BLN	OKTOBER	100.000	-	-	-	-	-	-	-	15
152	AGUZALI	RT 02/RW II	Seyuran	1.500.000	10 BLN	OKTOBER	150.000	-	-	-	-	-	-	-	15
153	ANI	RT 03/RW II	Kedai	5.000.000	10 BLN	OKTOBER	500.000	-	-	-	-	-	-	-	15
154	RENI ZAHARA	RT 03/RW I	Kedai	5.000.000	10 BLN	NOVEMBER	500.000	-	-	-	-	-	-	-	15
155	EDISON	RT 02/RW II	Bedak beras	2.000.000	10 BLN	NOVEMBER	200.000	-	-	-	-	-	-	-	15
155	ERNAWATI	RT 02/RW II	Kedai	3.000.000	10 BLN	NOVEMBER	300.000	-	-	-	-	-	-	-	15
156	KELOMPOK XXXIX														
157	MURILAS	RT 03/RW II	Kedai	3.000.000	10 BLN	DESEMBER	300.000	-	-	-	-	-	-	-	15
158	ENER	RT 03/RW II	Koran	5.000.000	10 BLN	DESEMBER	500.000	-	-	-	-	-	-	-	15
159	LENNY	RT 03/RW II	Kue	5.000.000	10 BLN	DESEMBER	500.000	-	-	-	-	-	-	-	15
	Jumlah			54.900.000			5.490.000	5.920.000							15

No	Aspek yang dipelajari	Adat dan informasi yang diperlukan	Teknik pengumpulan data dan informasi	Sumber informasi dan data	Analisa data
Tujuan penelitian I					
1	Mendeskripsikan pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari di Kelurahan Tabing Banada Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. (tahap I)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lokasi pelaksanaan program - Pelaksanaan di lapangan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> - Keyinforman dan responden - Kelurahan dan pokja 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis kualitatif
Tujuan penelitian II					
2	Mengetahui faktor-faktor penyebab kemacetan KMN di kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalao 1. Aturan Peminjaman 2. Aturan Pengembalian 3. Pengawasan	<p>a). Syarat Anggota Peminjam</p> <p>b). Besar pinjaman dan bunga pinjaman</p> <p>c). Kelompok awal dan kelompok tunggu</p> <p>a. Jangka Waktu Pengembalian</p> <p>b. Sanksi Keterlambatan</p> <p>c. Cara Pengembalian Kredit</p> <p>a. Pelaporan</p> <p>b. Peninjauan langsung</p> <p>c. Evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Questiner dan wawancara - Questiner dan wawancara - Questiner dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Keyinforman dan responden - Keyinforman dan responden - Keyinforman dan responden 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis kualitatif - Analisis kualitatif - Analisis kualitatif